

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI, DAN KOMITE
AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
(Studi Kasus Perusahaan yang Listing di ISSI Pada Tahun 2020-2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh : Suciyanti Yulia Fajar

NIM : 2005046051

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PESETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar Hal
 : Naskah Skripsi
 An. Suciyanti Yulia Fajar

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Suciyanti Yulia Fajar
 NIM : 2005046051
 Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
 Judul Skripsi : PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di ISSI Pada Tahun 2020 - 2023).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing I

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt

NIP. 197912222015032001

Pembimbing II

Fajar Adhitva, S.Pd., M.M.

NIP. 198910092015031003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Semarang Telp. 024-7601295, Fax. 024-7615387

PENGESAHAN

Nama : Suciyanti Yulia Fajar
 NIM : 2005046051
 Judul : **PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di ISSI Pada Tahun 2020- 2023)**

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal :

25 September 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 30 September 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Singgih Muherantohadi, M. E. I.
 NIP. 198210312015031003

Sekretaris Sidang,

Fajar Adhitva, S.Pd., M. M.
 NIP. 198910092015031003

Penguji I,

Mardhiyaturrositaningsih, S. E. Sv., M.E.
 NIP. 199303112019032020

Penguji II,

Rabi'atul Adawiyah, Lc., M.S.I.
 NIP. 198911012019032008

Pembimbing I,

Dr. Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
 NIP. 197912222015032004

Pembimbing II,

Fajar Adhitva, S.Pd., M. M.
 NIP. 198910092015031003



MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

*And those who believe and do righteous deeds - We will surely admit them among the righteous
[into Paradise].*

(QS. Al-‘Ankabut : 9)

**“Jadilah kuat untuk segala hal yang membuatmu patah, tetaplah bersinar
atas segala hal yang membuatmu redup”**

-cttnscyf-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini.

Kedua Orang Tua Penulis

Kedua orang tua saya, **Bapak Asri** dan **Ibu Darmini Nurul Masruroh** tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tanpa henti, memberi dukungan setiap keputusan yang saya ambil. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua saya. Terima kasih telah mengisi dunia saya dengan indah dan penuh kebahagiaan, yang selalu memberi tanpa mengharap kembali, bak mentari yang bersinar.

Keluarga Penulis

Adik-adik saya tercinta **Sania Kun Mahmudah** dan **Halimah Salfina Maulida**, yang telah memberikan semangat, semoga kita semua bisa membanggakan kedua orang tua. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat selama saya studi.

Teman dan Sahabat Penulis

Para warga “trading” teman selama kuliah, Fanny, Fatika, Khofifah, Evita, Indri dan Lalak selaku teman dekat penulis, terima kasih atas bantuan, dukungan, berbagi keluh kesah, saling mengingatkan. Terima kasih telah membuat saya tidak merasa sendirian, sudah membuat masa kuliah lebih seru dengan tingkah laku kalian. Sahabat saya selama di SMK, Nadine, Rashinta, Mei, Tiara dan Nadila yang memberi semangat, yang masih mau mendengarkan keluh kesah, berbagi cerita serta memberi solusi. Teman bermain saya kemanapun, Zahra, Amel dan Risya yang senantiasa memberi dukungan serta doa di setiap langkah yang saya jalani, tetap dalam kebaikan bersama, terima kasih telah menemani selama berproses. Teman-teman kelas **AKS-B 2020** teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberi semangat dukungan serta doa.

Diri Sendiri

Untuk diri saya sendiri Suciyanti Yulia Fajar, terima kasih telah menjadi kuat dan hebat untuk diri sendiri. Perjuangan selama kuliah memang tidak mudah, namun ternyata saya dapat melalui dengan penuh bahagia. Ternyata jatuh cinta pada diri sendiri jauh lebih baik dalam meromantiasasi kehidupan ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di ISSI Pada Tahun 2020-2023)” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan beban rujukan.

Semarang, 19 September 2024

Deklarator



Suciyanti Yulia Fajar

NIM. 2005046051

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu hal yang krusial dalam penyusunan skripsi. Karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan abjad Arab wajib di salin kedalam abjad latin. Pedoman transliterasi arab latin ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Śa	ś
ج	Jim	J
ح	Ĥa	ĥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Žal	Ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Şad	ş
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	G

ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

ABSTRAK

Keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat hampir pasti membawa dampak negatif, meskipun memiliki dampak positif berupa kesejahteraan dan pembangunan. Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki dampak positif dalam pengelolaan perusahaan. Melalui dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebagai para pemangku kepentingan dalam perusahaan diharap dapat dengan luas melakukan pelaporan maupun pengungkapan. Terlebih dalam pengungkapan laporan keberlanjutan yang tidak hanya terfokus pada kesejahteraan instansi, namun juga peduli dengan aspek lingkungan dan aspek sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang konsisten listing di ISSI pada tahun 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan teknik purposive sampling yang artinya pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan dan masalah pada penelitian. Data yang diambil dari tahun 2020-2023 dengan sampel 39 perusahaan, dari 39 perusahaan dikali 4 tahun pengamatan didapat sampel 156. Metode pengumpulan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada perusahaan sampel. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas), uji hipotesis (analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Serta hasil dari uji f (simultan) menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Kata Kunci : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Laporan Keberlanjutan

ABSTRACT

The presence of companies in the community almost certainly has a negative impact, even though it has a positive impact in the form of welfare and development. The implementation of Good Corporate Governance has a positive impact on company management. Through the board of commissioners, board of directors and audit committee as stakeholders in the company, it is hoped that they can carry out extensive reporting and disclosure. Especially in disclosing sustainability reports which are not only focused on the welfare of the agency, but also care about environmental and social aspects. This research aims to empirically analyze the influence of the board of commissioners, board of directors and audit committee on the disclosure of sustainability reports in companies that are consistently listed on ISSI in 2020-2023. This research uses a quantitative method with a purposive sampling technique, which means selecting samples based on the objectives and problems of the research. Data taken from 2020-2023 with a sample of 39 companies, from 39 companies multiplied by 4 years of observation, we got a sample of 156. Secondary data collection methods from annual reports and sustainability reports on sample companies. Data were analyzed using descriptive analysis, classical assumption tests (normality test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, and multicollinearity test), hypothesis testing (multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, t statistical test, and F statistical test). The research results show that the board of commissioners has a significant positive effect on disclosure of sustainability reports, the board of directors has no significant effect on disclosure of sustainability reports, and the audit committee has no significant effect on disclosure of sustainability reports. And the results of the f test (simultant) show that the board of commissioners, board of directors and audit committee jointly influence the disclosure of sustainability reports.

Keywords: *Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Sustainability Report*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus Perusahaan yang Listing di ISSI Pada Tahun 2020-2023)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Nurfatoni, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, serta selaku Wali Dosen Penulis yang selalu memberi arahan selama studi.
4. Ibu Dr. Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M. dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Asri dan Ibu Darmini Nurul Masruroh yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang. Serta adik-adik saya yang selalu memberi semangat tanpa henti.
8. Serta kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfudz, yang saat ini belum diketahui keberadaannya entah di bumi bagian mana, dan sedang mengagumi hati siapa. Percayalah kamu adalah salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, agar kamu kelak bangga terhadap penulis yang telah melewati hari-hari sulitnya sendirian. Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu, tapi saya harap kelak kita akan dipertemukan di waktu yang tepat dengan versi terbaik.
10. Dan diri saya sendiri, Suciyanti Yulia Fajar yang telah bertahan untuk berjuang sampai detik ini dengan penuh semangat.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2024

Penulis

Suciyanti Yulia Fajar

NIM. 2005046051

DAFTAR ISI

PESETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Stakeholders	12
2.2 Laporan Keberlanjutan	13
2.3 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	15
2.4 Dewan Komisaris.....	17
2.5 Dewan Direksi	19
2.6 Komite Audit.....	20
2.7 Penelitian Terdahulu	22
2.8 Perumusan Hipotesis	24
2.9 Kerangka Konseptual	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis dan Sumber Data	29
3.2 Populasi dan Sampel	29
3.2.1 Populasi.....	29

3.2.2	Sampel.....	30
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5	Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	32
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.3	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2	Hasil Analisis Data Penelitian.....	39
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
4.2.3	Uji Hipotesis.....	44
4.3	Pembahasan dan Analisis Data.....	49
4.3.1	Pengaruh Dewan Komisaris (X1) terhadap Laporan Keberlanjutan (Y).....	49
4.3.2	Pengaruh Dewan Direksi (X2) terhadap Laporan Keberlanjutan (Y).....	50
4.3.3	Pengaruh Komite Audit (X3) terhadap Laporan Keberlanjutan (Y).....	53
BAB V	56
PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah peserta ISRA tahun 2005-2019.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Penentuan Kriteria Sampel	30
Tabel 3. 2 Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian	31
Tabel 4. 1 Daftar Sampel Penelitian	38
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif	39
Tabel 4. 3 Uji Normalitas	41
Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas	42
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi	43
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4. 7 Uji Analisis Regresi Berganda.....	44
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinan.....	46
Tabel 4. 9 Uji Statistik F	47
Tabel 4. 10 Uji Statistik T	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai tempat manusia beraktivitas dan tinggal merupakan suatu hal serius yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah dan sektor pelaku bisnis. Lingkungan aktivitas bisnis mendorong perusahaan agar memiliki kegiatan bisnis yang bisa bertahan dalam waktu yang lama, bahkan untuk jangka panjang.¹ Perusahaan merupakan pelaku bisnis yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, polusi air, kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan lainnya, akibat dari kegiatan operasional perusahaan maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan. Sudah semestinya perusahaan sadar permasalahan yang ditimbulkan. Kepekaan terhadap lingkungan dan penerapan keberlanjutan menjadi hal yang utama dalam menjalankan roda perusahaan.

Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan, dan keberadaannya tidak tergantung pada keduanya. Pada dasarnya, semua perusahaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dan bagaimana perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi. Perusahaan selalu berusaha mencari laba yang tinggi melalui kegiatan ekonominya tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas usaha tersebut.² Tanpa disadari kegiatan yang berlangsung telah merusak lingkungan, menimbulkan polusi, serta merusak ekosistem lingkungan. Banyaknya kegiatan operasional menjadikan pencemaran lingkungan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Dampak yang dibuat sudah pasti dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan hampir pasti memiliki dampak negatif pada masyarakat, meskipun mereka juga memiliki dampak positif berupa kesejahteraan dan pembangunan. Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 pasal 74 tahun 2007, telah mengatur kesadaran untuk menjaga lingkungan, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam bersifat wajib atau mandatory melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pada POJK Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik yang

¹ Rudolf Josua and Aditya Septiani, "Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan," *Journal Of Accounting* 9 (2020): 1–9, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
² Pratama, Andri, Agung Yulianto. (2015). Faktor Keuangan Dan Corporate Governance Sebagai Penentu Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, Vol 4(2), hal 1-10.

berada di Indonesia. Sanksi administratif akan dikeluarkan oleh OJK yang berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/PJOK.03/2017 untuk lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik yang tidak melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih minim, dilihat dari peserta yang ikut ajang Indonesia *Sustainability Reporting Award* (ISRA). Penghargaan tahunan ini terselenggara atas kerjasama *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR).³ Tujuan diselenggarakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) adalah untuk memberikan pengakuan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan dan mempublikasikan informasi mengenai lingkungan, sosial dan informasi keberlanjutan terintegrasi.⁴ Setiap tahunnya peserta ISRA memang bertambah namun tidak proposional dengan perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepesertaan ISRA dilakukan dengan pendaftaran oleh setiap perusahaan. Perusahaan yang mengikuti ajang ISRA merupakan sukarela tanpa ada paksaan, namun setiap perusahaan yang mengikuti ISRA dikenakan biaya pendaftaran.



Sumber : Indonesia Sustainability Report Awards Website

Gambar 1. 1 Jumlah peserta ISRA tahun 2005-2019

³ Maulida Hirdianti Bandi Adistie Gisti Riza, "Analisis Faktor Penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards Terhadap Pengungkapan Sosial," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3 (2019): 29–39.

⁴ Syafrudin and Meliana Panjaitan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) (Studi Kasus Pada Perusahaan BEI Peraih Penghargaan ISRA 2013-2016)," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2020): 45–56, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/download/1399/795/>.

Dari *Gambar 1.1* dapat kita lihat kepesertaan ISRA setiap tahunnya meningkat sedikit demi sedikit. ISRA merupakan ajang apresiasi untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memelihara keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dengan membuat pelaporan atas kegiatan ekonomi serta menyangkut aspek lingkungan dan sosial.⁵ Kurangnya partisipasi perusahaan dalam ajang ISRA menjadikan masalah, apakah perusahaan benar melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan atau hanya membuat laporannya saja. Padahal dengan berpartisipasi di ajang ISRA akan memberikan motivasi dan semangat bagi perusahaan di Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Investor juga akan melirik perusahaan yang mendapat penghargaan dari ajang ISRA, sehingga dapat meningkatkan eksistensi dimata investor.

Sebagai bentuk tanggung jawab serta sebagai gerakan menyakinkan masyarakat bahwa perusahaan bertanggungjawab atas kegiatan perusahaan untuk lingkungan sekitar. Perusahaan wajib untuk melakukan atau membuat sebuah pengungkapan mengenai tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan sosial yang biasanya disebut dengan laporan keberlanjutan atau *sustainability report*.⁶ Selain untuk menyakinkan masyarakat sekitar, pengungkapan laporan keberlanjutan juga dapat menyakinkan para investor dalam memilih suatu perusahaan.

Laporan keberlanjutan memiliki pedoman yang mengacu terhadap indeks standar GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI adalah praktik terbaik di seluruh dunia untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik.⁷ Pelaporan keberlanjutan yang memberikan informasi perihal kontribusi positif maupun negatif perusahaan dikembangkan berdasarkan Standar GRI untuk pembangunan berkelanjutan. Pedoman ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan dengan cara menyediakan informasi yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

Saat ini, fokus utama di seluruh dunia adalah menciptakan dan mengembangkan metode pembangunan berkelanjutan. Pada saat ini, negara-negara berkembang, bukan hanya di negara maju, sedang berjuang untuk meningkatkan ekonomi global, meskipun sumber daya mereka semakin berkurang. Banyak perusahaan besar yang mendorong pertumbuhan

⁵ Adistie Gisti Riza, "Analisis Faktor Penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards Terhadap Pengungkapan Sosial."

⁶ Mariya Safitri and Saifudin, "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report," *Jurnal Bingkai Ekonomi* 4, no. 1 (2019): 13–25.

⁷ Oriën Natalia and Wahidahwati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016): 1–23.

ekonomi global dan teknologi saat ini dikritik karena dampak negatif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti polusi, limbah, dan penipisan sumber daya yang cepat. Banyak perusahaan besar yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi dunia dan teknologi dikritik atas dampak negatif.

Sejak tahun 1999, kesadaran pertanggung jawaban sosial telah ada di Indonesia. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, dan tidak ada aturan yang mengatur bagaimana dan apa yang harus dilaporkan tentang laporan keberlanjutan. Akibatnya, konten laporan masih bersifat sukarela. Berdasarkan data dari OJK per tahun 2016, hanya sekitar 9% dari seluruh perusahaan publik tercatat di BEI yang telah menerbitkan *sustainability reporting* yang mengacu GRI Standards dan pengungkapan masih bersifat sukarela. Namun, kini melalui Peraturan OJK No. 51/2017 terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik seluruh emiten termasuk lembaga keuangan diharuskan untuk menerbitkan *sustainability reporting* secara bertahap mulai periode pelaporan tahun 2019.⁸ Regulasi yang telah dibuat sudah semestinya menjadi panduan untuk seluruh perusahaan publik dalam melaksanakan pertanggung jawaban sosial.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia, dari pihak investor pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menjadi sebuah perhatian khusus. Dalam penelitian Laskar beberapa terakhir menunjukkan bahwa ada dampak relatif dari pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) terhadap kinerja keuangan di negara maju dibandingkan negara berkembang di Asia. Dalam hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat pengungkapan SR terendah, yaitu 72% (dibandingkan dengan Jepang 90%, India 88%, dan Korea Selatan 85%).⁹ Investor tidak hanya mengandalkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi, tetapi laporan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Akibatnya, perusahaan yang *go public* mulai membuat laporan keberlanjutan demi mencuri perhatian dari pihak investor.

Laporan Keberlanjutan merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja suatu perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan

⁸ Farhana, Siti, Yang Elvi Adelina. (2019). Relevansi Nilai Laporan Keberlanjutan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 10(3), hal 615-628.

⁹ Laskar Najul, "Impact of Corporate Sustainability Reporting on Firm Performance: An Empirical Examination in Asia," *Journal of Asia Business Studies* 12 (2018): 571–593.

berkelanjutan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang telah ungkap di dalamnya. Global Reporting Initiative (GRI) mendorong akuntansi keberlanjutan sebagai masalah global dalam pelaporan keberlanjutan. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman (standar) Global Reporting Initiative (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan disusun tersendiri terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan.¹⁰

Akuntansi keberlanjutan sebagai isu global dalam pelaporan keberlanjutan, menjadi bagian dari tantangan pelembagaan sistem pelaporan terintegrasi. Tujuan pengungkapan laporan keberlanjutan adalah untuk meningkatkan prospek perusahaan dengan membantu meningkatkan transparansi, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menunjukkan kepedulian dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini tidak terbatas pada keuntungan, mengurangi risiko kerugian, meningkatkan kemampuan dan kesiapan pemangku kepentingan, dan menganalisis investor.

Dengan adanya tuntutan dari para investor yang sudah melek akan pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan, serta regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkap keberlanjutan. Menjadikan atensi khusus untuk perusahaan atas pengungkapan laporan keberlanjutan serta mentaati regulasi yang ada. Maka dari itu pentingnya Perusahaan untuk melakukan serta menjaga keberlanjutan melalui indeks GRI yang telah di tetapkan. Sesuai dengan indeks yang ada, semakin banyak indeks yang diungkapkan maka akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan sosial Masyarakat.

Dewan komisaris merupakan sekelompok individu yang terpilih dalam RUPS serta dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi.¹¹ Keefektifan pengendalian suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana dewan komisaris dibentuk dan diorganisir. Dengan adanya dewan komisaris dapat menentukan kebijakan manajemen dalam penyelenggaraan serta pengembangan pengendalian internal. Jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat memberi tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pelaporan perusahaan. Jika kualitas pengungkapan pelaporan perusahaan meningkat, manajemen akan mengungkap informasi yang luas, termasuk pengungkapan terus menerus tentang perusahaan.

¹⁰ Safitri and Saifudin, "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

¹¹ LL.M. Munir Fuady, S.H., M.H., *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 2nd ed. (Citra Aditya Bakti, 2017).

Dewan direksi merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh pemegang saham untuk menjalankan kepengurusan perusahaan dalam kepentingan perusahaan. Dewan direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan roda bisnis serta untuk mewujudkan kebijakan strategik setiap harinya, dewan direksi dapat menerapkan prinsip GCG. Dewan direksi juga memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman perusahaan dalam menerapkan GCG. Dewan direksi melaksanakan koordinasi dan melakukan komunikasi secara berkala untuk tetap menjaga efektifitas berjalannya manajemen perusahaan.¹² Semakin baik kinerja dewan direksi, maka semakin kokoh tata kelola perusahaan, yang diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan upaya perusahaan melakukan kewajiban sosial dan mengungkapkannya melalui pengungkapan laporan keberlanjutan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komiaris agar dapat lebih ketat pengawasan pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam memonitor aktifitas dewan direksi agar sesuai dengan ketentuan hukum serta regulasi, komite audit hadir untuk menjembatani antara dewan direksi dengan auditor internal, auditor eksternal, dan anggota independen. Oleh karena itu, komite audit juga diberi tanggung jawab dalam pengawasan terkait kualitas keterbukaan perusahaan baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Pengawasan mendalam dari komite audit dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dan keterbukaan yang lebih baik. Sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan dan kemudian melakukan pelaporan.¹³ Dengan adanya komite audit maka, akan semakin terbuka terkait pengungkapan laporan keberlanjutan dalam suatu perusahaan.

Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Seperangkat aturan yang mengatur suatu sistem untuk mengendalikan perusahaan dimana hubungan antar pemegang saham, manajemen, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan secara internal maupun eksternal telah dikembangkan dengan pedoman *Good Corporate Governance* sesuai

¹² Faizah Naila Sofa and Naila WeningTyas Respati, "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)," *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 39.

¹³ Ria Aniktia and Muhammad Khafid, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report," *Accounting Analysisi Journal* 4, no. 3 (2015): 1–10.

yang di definisikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI)*.¹⁴ Implementasi nyata dari penerapan *Good Corporate Governance* dengan prinsip bahwa *stakeholder* butuh perhatian tentang ketentuan dalam membuat pemangku kepentingan bekerja sama untuk kelangsungan hidup jangka panjang dengan perusahaan dapat dilihat dari pelaporan keberlanjutan pada perusahaan.

Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan peranan prinsip-prinsip dari GCG yang meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness*.¹⁵ Dengan adanya 5 prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sudah selayaknya perusahaan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Tidak hanya manfaat untuk perusahaan namun juga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Jika laporan keberlanjutan sudah banyak di ungkap oleh banyak perusahaan, dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Bukan hanya terfokus pada keuntungan semata, akan tetapi juga bertanggungjawab dengan sosial dan lingkungan perusahaan.

Konstituen ISSI merupakan seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI.¹⁶ Menurut Fatwa MUI, saham syariah adalah bukti kepemilikan perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, lembaga keuangan konvensional (ribawi), produsen, distributor, atau pedagang makanan dan minuman haram, produsen, distributor, atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral, dan perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang lebih besar kepada lembaga keuangan ribawi daripada jumlah modalnya. Walaupun tidak mengikat, pada praktiknya fatwa DSN-MUI digunakan sebagai referensi dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Pelabelan syariah pada konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sudah sewajarnya perusahaan yang terdaftar dalam ISSI juga harus melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan didasarkan pada gagasan yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹⁷ Selain itu, bermanfaat juga untuk menarik para investor karena telah melakukan

¹⁴ Ilham Nuryana Fatchan and Rina Trisnawati, "Pengaruh Good Corporate Governance Pada Hubungan Antara Sustainability Report Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Go Public Di Indonesia Periode 2014-2015)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 25–34.

¹⁵ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–267.

¹⁶ Siti Aisyah Suciningtias and Rizki Khoiroh, "Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)," *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2, no. 1 (2015): 398–412.

¹⁷ Dessy Noor Farida and Naili Saadah, "Etika Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Bingkai Al-Qur'an" 7 (2019): 343–366.

tanggungjawab terhadap sosial serta lingkungan. Sudah semestinya perusahaan menjaga kesejahteraan umat, tidak hanya mencari kesejahteraan perusahaan hingga melupakan lingkup sekitar. Sesuai dengan pelabelan “Syariah” maka perusahaan mestinya menerapkan konsep syariah dalam melaksanakan bisnis.

Penelitian terdahulu Rana Fathinah Ananda dan Yusnaini¹⁸ menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil berbeda dengan penelitian Faizah Naila Sofa Novita dan Wening Tyas Respati¹⁹ yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu Faizah Naila Sofa Novita dan Wening Tyas Respati²⁰ menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil berbeda dengan penelitian Orien Natalia dan Wahidahwati²¹ yang menyimpulkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu Rosita Wulandari, Syifa Fauziyah, dan Ali Mubarak²² menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hasil berbeda dengan penelitian Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, dan A.Waluya Jati²³ yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan gap research diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu, telah mengkaji sejauh mana pengaruh

¹⁸ Rana Fathinah Ananda and Yusnaini, “The Effect Of Board Of Commissioners And Board Of Directors On Sustainability Report Disclosure In Companies Registered On The IDX 2020,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 1 (2023): 1014–1021, <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

¹⁹ Sofa and Respati, “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017).”

²⁰ Faizah Naila Sofa and Novita WeningTyas Respati, ‘Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)’, *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13.1 (2020), 32–49.

²¹ Natalia and Wahidahwati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report.”

²² Rosita Wulandari, Syifa Fauziyah, and Ali Mubarak, “Pengaruh Komite Audit Dan Struktur Modal Terhadap Pengungkapan Sustainability Report,” *Accountthink : Journal of Accounting and Finance* 6, no. 02 (2021): 181–193.

²³ Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, and Ahmad Waluya Jati, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Di Indonesia,” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 711–720.

struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Perbedaan dengan penelitian yang saya buat yaitu menurut penelitian Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, dan A.Waluya Jati²⁴ yang menyarankan untuk menentukan perusahaan yang menjadi sampel berdasarkan jenis perusahaan, dan karakteristik perusahaan. Dengan adanya perbedaan tersebut serta penelitian terdahulu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus Perusahaan Yang Listing Di ISSI Pada Tahun 2020-2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
2. Apakah Kinerja Dewan Direksi mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
3. Apakah Kinerja Komite Audit mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kinerja Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kinerja Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan, menjadi evaluasi pemerintah dalam membuat regulasi dan peraturan untuk perusahaan public di Indonesia. Dengan adanya regulasi, pengawasan serta sanksi yang tegas dapat menjadikan gebrakan luar biasa untuk keberlanjutan. Bermanfaat juga pada aspek sosial dan lingkungan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menyampaikan keterbukaan

²⁴ Ibid.

informasi yang ada pada perusahaan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang terkait aspek lingkungan maupun sosial.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan tentang pengungkapan laporan keberlanjutan dan bagaimana tata kelola yang baik mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan laporan tahunan. Mengikuti isu-isu lingkungan yang terjadi pada perusahaan publik. Ataupun dapat memberi dorongan untuk melaksanakan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar bisa mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Dapat mengawasi kegiatan perusahaan yang sangat memberi dampak pada lingkungan dan sosial. Sudah saatnya masyarakat sadar akan kegiatan bisnis yang ada pada perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membagi ke dalam lima (5) bab yang berurutan dan saling berkaitan antara lain :

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini menguraikan mengenai tujuan yang memuat tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Dalam bab ini berisikan dari jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variable penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan.

Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit, deskripsi dan penelitian, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup.

Merupakan bagian akhir dari penelitian ini, berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholders

Penggunaan istilah *stakeholder* awal muncul pada publikasi tahun 1963 yang mendefinisikan bahwa para pelaku bisnis telah mengekspresikan konsep *stakeholder* jauh sebelum awal 1960-an.²⁵ *Stanford Research Institut* (SRI) adalah lembaga yang pertama kali menggunakan konsep *stakeholder*. *Stakeholder* Kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi sesuai dengan definisi pada *Stanford Research Institut* (SRI).²⁶ Eksistensi suatu perusahaan merupakan dukungan dari para pemangku kepentingan. Perusahaan merupakan entitas yang beroperasi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain) sesuai dengan pernyataan *Stakeholder theory*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Pelanggan, karyawan, lingkungan, pemasok, pemegang saham merupakan komunitas bagian dari pemangku kepentingan. Dengan *stakeholder theory* menjelaskan bahwa pemangku kepentingan berhak untuk memperoleh informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.²⁷ Dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit selaku pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan, menjadi tolak ukur arah pelaporan keberlanjutan. Karena kebijakan ada pada pemimpin serta pengawas perusahaan.

Dalam laporan keberlanjutan lingkungan terdapat informasi yang transparan tentang posisi dan aktivitas perusahaan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan penerbitan laporan keberlanjutan lingkungan, *stakeholder* dapat secara langsung menilai kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi mereka kepada perusahaan.

Hubungan *stakeholder theory* dengan variabel dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan

²⁵ Gadang Ali Syariati Pradono Gede Eko Putra Sri Sentanu, Yuniawati Anti Tirani, *Kolaborasi Dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2024).

²⁶ Natalia and Wahidahwati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report."

²⁷ Widyastuti, Sari Mustika, "*Pernyataan Jaminan Laporan Keberlanjutan*" , Bantul, DIY : Jejak Pustaka, 2022.

keberlanjutan. Untuk tetap menjaga hubungan dengan para *stakeholder* perusahaan salah satunya dengan melakukan pengungkapan atau membuat pelaporan keberlanjutan. Diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Hubungan yang harmonis akan menjadikan perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*). Melalui pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

2.2 Laporan Keberlanjutan

GRI (*Global Reporting Initiative*) mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder* melalui praktik pengukuran, komunikasi pengungkapan, dan upaya untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan baik internal maupun eksternal.²⁸ Laporan keberlanjutan menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial secara terbuka dan dapat di akses banyak pihak. Laporan keberlanjutan dapat memberikan informasi atas keterbukaan dampak positif maupun negatif yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan.

Perusahaan tidak cukup hanya melakukan pelaporan mengenai keuangan saja, namun harus juga melakukan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana konsep *Triple Bottom Line* yang pada 3P (*People, Planet, Profit*). Dengan memaksimalkan konsep *Triple Bottom Line* perusahaan lebih mungkin meningkatkan kinerja keuangan sambil menguntungkan seluruh dunia. Dengan adanya konsep *Triple Bottom Line* secara sadar bahwa perusahaan tidak hanya terfokus pada profit, namun fokus juga dalam isu lingkungan sosial. Penekanan konsep ini berpotensi dalam pengelolaan perusahaan yang berkelanjutan. Kesadaran perusahaan dalam mempublikasikan kinerja lingkungan dalam dokumen yang berdiri sendiri atau biasa disebut laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan perusahaan harus menunjukkan bahwa baik kontribusi positif maupun negatif yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan seimbang dan masuk akal. Perusahaan harus dapat menjelaskan bagaimana menggunakan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan nilai dan model tata kelolanya. Perusahaan juga harus dapat menjelaskan strategi dan komitmennya dengan keberlanjutan ekonomi global.

Lima mekanisme penyajian yang dilakukan dalam proses pelaporan keberlanjutan,

²⁸ Safitri and Saifudin, "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

yaitu, pertama perusahaan harus menentukan sebuah kebijakan berkelanjutan dan kemudian melakukan pengungkapan. Kedua, menentukan standar kinerja keberlanjutan dan pelaporan untuk rantai pemasok, yang konsisten dengan harapan masyarakat terhadap barang dan jasa yang ramah lingkungan sehingga dapat mendukung keberlanjutan. Ketiga, mengungkapkan keterlibatan antar pemangku kepentingan. Keempat, perusahaan harus mengembangkan dan melaporkan elemen kinerja *sustainability*, dan jika mereka belum melakukannya, mereka harus menjelaskan alasannya. Kelima, rating, *benchmarking*, pajak, subsidi, izin izin yang dapat diperdagangkan, kewajiban, serta larangan.²⁹

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya; “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. As-Sajdah : 5)

Manusia sebagai makhluk berakal dimuka bumi, sudah semestinya dengan sadar untuk menjaga kelestarian bumi. Manusia yang biasa di sebut dengan *khalifah fil ardh* yaitu sebagai pengganti atau wakil Allah SWT di bumi dengan sadar bahwa alam semesta yang ada hanyalah titipan Tuhan. Perspektif yang muncul sebagai *khalifah fil ardh* adalah bahwa manusia dalam menyembah Tuhan tidak hanya terbatas pada melakukan ritual keagamaan (sholat, puasa, zakat, beramal, dll) akan tetapi juga berkewajiban menjaga alam semesta dengan semua komponennya untuk tujuan akhir kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain. Begitupun dengan kegiatan pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.³⁰

Tinjauan dari sudut pandang islam, perlindungan lingkungan demi kewaspadaan sangat penting bagi seluruh umat manusia. Manusia sudah sepatasnya melestarikan dan mengembangkan alam yang menjadi hunian manusia.³¹ Bukti nyata dari sektor ekonomi yang telah melestarikan alam melalui diungkapnya laporan keberlanjutan. Tidak hanya mencari keuntungan, namun juga peka terhadap lingkungan masyarakat. Peduli lingkungan sekitar, memberi dampak positif juga pada masyarakat dan lingkungan.

²⁹ M. A. Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

³⁰ Farida and Saadah, “Etika Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Bingkai Al-Qur’an.”

³¹Fitria Andestri Dessy Noor Farida, Fajar Adhitya, *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan baik. Dengan adanya tata kelola, maka perusahaan yang memiliki agenda lebih luas dimasa yang akan datang. Dengan penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* dapat berfungsi untuk mendorong terciptanya efisiensi pasar, transparan, dan konsisten dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan suatu perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang. Dari fokus akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu konsep, dipandang perlu menentukan dasar/kaidah yang menjadi landasan dalam menjabarkan konsep *Good Corporate Governance*.³² Landasan/prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Secara umum ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi atau biasa disebut transparan, dimana suatu entitas memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan agar tetap objektif dalam menjalankan operasi mereka. Selain peraturan undang-undang, perusahaan harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengungkap atau membuat laporan. Namun, termasuk hal-hal penting yang harus dipertimbangkan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya saat membuat keputusan. Misalkan laporan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.³³

³² Njatrijani, Rahmanda, and Saputra, "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan."

³³ Ibid.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.³⁴ Memberi pertanggungjawaban yang wajar dan transparan untuk kinerja perusahaan, dengan pengukuran yang difokuskan pada pencapaian perusahaan dan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemegang saham.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan tanggung jawab sosial serta lingkungan untuk mendukung bisnis dalam jangka Panjang untuk mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.³⁵ Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan perusahaan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta tidak saling melempar tanggung jawab.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk menyampaikan masukan serta pendapat bagi kepentingan perusahaan.

Dari prinsip diatas dapat disimpulkan, jika perusahaan telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka tidak hanya menguntungkan untuk satu pihak saja. Selain perusahaan banyak pihak yang juga ikut merasakan dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu seluruh para pemangku kepentingan, baik *stakeholder* maupun lingkungan masyarakat. Karena tujuan dari *Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri untuk keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan, sehingga dapat menguntungkan

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

perusahaan, aspek sosial dan aspek lingkungan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah:30)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap manusia adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri. Jadi sudah semestinya para pemimpin terutama pemimpin pada perusahaan sadar akan pentingnya menjaga bumi yang memberikan keberkahan terhadap kita sebagai mahluk hidup. Serta melakukan pertanggungjawaban lingkungan berdasarkan konsep yang telah diatur dalam Al Qur’an, yaitu dengan mengimplementasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

2.4 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris biasanya terdiri dari sekelompok individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan arah perusahaan atau organisasi. Dewan komisaris dibentuk sebagai langkah dalam melaksanakan pengendalian internal tertinggi dalam bertanggung jawab serta mengawasi kinerja manajemen atau dewan direksi.³⁶ Sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) UUPU yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.³⁷ Tugas utama dari komisaris ini adalah mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Direktur di dalam perusahaan. Dengan kata lain, dewan komisaris akan membimbing direksi untuk menjalankan operasional bisnis yang sesuai dengan visi, misi, dan value perusahaan.

³⁶ Widowati, Winda Wahyu, Siti Mutmainah. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2020). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 12 (1), Hal 1-15.

³⁷ Anmora Arsan, Hasnati, and Fahmi, “Kedudukan Hukum Komisaris Berdasarkan Undang Undang,” *Veritas Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 72–88.

Lebih lanjut tugas utama dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerjam mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta menonitor penggunaan modal perusahaan , investasi dan penjualan asset.
2. Menilai system penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada Tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk pengalagunaan perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan apabila diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam Perusahaan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 20 ayat (1), mengatur bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris. Dari 2 orang anggota dewan komisaris 1 diantaranya merupakan dewan komisaris independent. Akan tetapi jika anggota komisaris lebih banyak dapat mempengaruhi kinerja dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris setiap perusahaan tentu berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka, semakin baik pula pengawasan manajemen terhadap dewan direksi.

Penambahan anggota komisaris perusahaan menggunakan mekanisme yang diterima secara normatif untuk mendapatkan hasil yang positifas penambahan komisaris serta mencapai tujuan penting perusahaan berkaitan pengungkapan keberlanjutan.³⁸ Besarnya ukuran dewan komisaris dapat memberikan dampak baik dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, karena dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pengelolaan manajemen. Serta pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal, dan memberi dampak positif dalam pengungkapan laporan keberlanjutan.

³⁸ Bunga Novitasari, Andi Manggala Putra, and Akhmad Saebani, "Artikel Tersedia Pada Sitasi: Artikel Masuk Artikel Diterima," *Manajemen dan Akuntansi* 24, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).

Dewan komisaris merupakan badan pengawas kebijakan (badan supervisi). Dewan komisaris mengawasi jalannya perseroan secara umum. Dipilihnya dewan komisaris tentunya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keberadaannya bukan hanya untuk pemegang saham saja melainkan untuk kepentingan perusahaan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan dewan komisaris yang independen, menunjukkan bahwa komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

2.5 Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan roda perusahaan setiap hari, sesuai kebijaksanaan strategik sebagai penjamin terwujudnya prinsip *accountability* dan *fairness* yang terdapat dalam GCG.³⁹ Menurut Undang-undang No 40 tahun 2007 pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain : memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan, memilih, menetapkan, maupun mengawasi tugas dari karyawan; menyetujui anggaran tahunan perusahaan; menyampaikan laporan kepada pemegang saham. Dewan direksi diproksikan dengan jumlah rapat dewan direksi dalam waktu 1 (satu) tahun.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris.⁴⁰ Kinerja dewan direksi salah satunya dapat dilihat melalui seberapa sering rapat yang terlaksana dalam satu periode. Melalui rapat dan pertemuan, komunikasi dewan direksi akan menjadi lebih aktif dalam hal pengelolaan perusahaan. Bagaimanapun komunikasi merupakan hal penting dalam menjalankan suatu organisasi, serta

³⁹ Natalia, Orien. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 5(11), hal 1-23.

⁴⁰ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*.

untuk mencapai tujuan bersama.

Dewan direksi dalam satu bulan wajib mengadakan rapat minimal 1 kali. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 16 ayat (1), Dewan direksi minimal menyelenggarakan rapat 1 bulan sekali atau 12 kali dalam jangka waktu satu tahun. Namun, semakin banyak frekuensi rapat dewan direksi dapat meningkatkan kinerja pada dewan direksi. Setiap kali menyelenggarakan rapat poin-poin pembahasannya akan lebih luas begitupun dalam pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan.

Frekuensi rapat yang intens memberi ruang komunikasi pada anggota dewan komisaris untuk membahas hal-hal penting dalam manajemen perusahaan. Luasnya pembahasan dalam rapat-rapat yang terjadi memberikan ruang untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. Al-baqarah:124)

Dalam perspektif islam, dewan direksi diharapkan dapat mendorong pengelolaan perusahaan melalui prinsip kehati-hatian. Serta etika yang diterapkan oleh dewan direksi dapat mencontoh etika Nabi Muhammad SAW. Dimana karakter Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi kiblat atau panutan dewan direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan setiap harinya. Secara luas dapat dikaji bahwa karakter kenabian antara lain, siddiq, amanah, fatonah, adil, ihsan, tabligh serta bijaksana. Jika karakter dewan direksi mengadopsi dari Nabi Muhammad saw. Maka dapat memberikan dampak positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

2.6 Komite Audit

Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap pihak eksternal. Komite audit harus bertemu setidaknya empat kali setahun untuk meninjau audit terbaru, baik secara langsung atau melalui telekonferensi. Pertemuan tambahan harus diadakan jika masalah lain perlu ditangani. Peran komite audit meliputi pengawasan pelaporan keuangan, pemantauan kebijakan akuntansi, pengawasan

auditor eksternal, kepatuhan terhadap peraturan dan pembahasan kebijakan manajemen risiko dengan manajemen.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap peranan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan, melalui pengawasan yang dilakukan. Komite audit dapat memberikan pendapat yang independent kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris yang antara lain meliputi.⁴¹

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Komite audit merupakan badan yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dewan direksi dan manajemen perusahaan. Semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas.⁴² Frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun minimal 4 kali atau tiga bulan sekali. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 13 bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Namun rapat komite audit dapat dilaksanakan lebih dari 4 kali dalam satu. Frekuensi rapat yang dilakukan komite audit dapat memberikan dampak dari pengungkapan laporan keberlanjutan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan corporate governance perusahaan agar menjadi semakin baik⁴³

Kinerja komite audit dalam memberi pengawasan dapat memberi efek terhadap kualitas pelaporan. Semakin baik pengawasan yang dilakukan komite audit menjadikan laporan-laporan yang diungkap oleh perusahaan semakin valid dan memiliki kualitas yang

⁴¹ Franita Riska, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.

⁴² Safitri and Saifudin, "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

⁴³ Wanda Adila, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014" (2015): 777–792.

baik. Kinerja komite audit yang baik sudah pasti memberi arahan untuk melaksanakan ketaan perusahaan atas peraturan perundang-undangan. Bahwa tanggung jawab sosial sifatnya mandatory untuk seluruh perusahaan publik. Sehingga baiknya kinerja komite audit bisa memberi pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ۖ ٦

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ ٧

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ ٨

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۗ ٩

Artinya : “Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.” (QS Al-Insyiqaq: 7-9)

Komite audit yang menjadi pengawas manajemen perusahaan dalam kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, menjadi pendorong supaya perusahaan terjadi penyimpangan. Dengan keterbukaan pelaporan yang dibuat, dapat memberi kemudahan akses para pemangku kepentingan dalam pengawasan, maupun menilai suatu perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Faizah Naila Sofa dan Novita Wening Tyas Respati (2020)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Direksi (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. • Dewan Komisaris (X2) tidak berpengaruh terhadap

		(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)	<p>pengungkapan sustainability report.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit (X3) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan responsibility report. • Profitabilitas (X4) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. • Ukuran Perusahaan (X5) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.
2.	Siska Liana (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. • <i>Leverage</i> (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Ukuran Perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Dewan Komisaris (X4) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.

3.	Yanzil Azizil Yudaruddin dan Kuswardani Chandra Pratiwi (2020)	Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i> Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit (X1) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Dewan Direksi (X2) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Profitabilitas (X3) berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.
4.	Yenny Purbandari dan Ratna Suryani (2021)	<i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Sustainability Reporting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan direksi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Komite audit (X2) berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. • Dewan direksi dan komite audit (X3) berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.

2.8 Perumusan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan dewan komisaris sebagai pengawas pada organ perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, mengindikasikan semakin luas pemikiran anggota dewan komisaris dalam mewujudkan *good*

corporate governance.⁴⁴ Komisaris merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Dalam teori *stakeholder* dewan komisaris menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam perusahaan, maka semakin besar atau dominan proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat memberikan power untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan pelaporan perusahaan.

Keterbukaan informasi suatu perusahaan dapat memberi eksistensi pada perusahaan, dimana seluruh keterlibatan perusahaan yang berdampak positif maupun negatif dapat di ungkap. Seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang telah di ungkap oleh perusahaan. Bagaimanapun pemangku kepentingan selalu ingin mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi pada perusahaan.

Dengan pengungkapan laporan keberlanjutan, perusahaan dapat memberi pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar perusahaan tempat berjalannya bisnis tersebut. Tidak hanya mementingkan laba dari pihak perusahaan saja, akan tetapi memberi kontribusi untuk lingkungan sekitar. Serta penerapan prinsip *Tripel Bottom Line* (People, Planet, Profit) dalam menjalankan bisnis.⁴⁵

Dalam penelitian Rana Ananda dan Yusnaini⁴⁶ menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Peningkatan kualitas pengungkapan pelaporan ini, akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi seluas-luasnya termasuk informasi tambahan seperti sustainability report yang dilakukan oleh pihak manajemen. Jika citra perusahaan meningkat, maka hal tersebut menandakan pengawasan yang baik dari dewan komisaris dan kerja manajemen yang efektif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan :

⁴⁴ Safitri and Saifudin, "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

⁴⁵ Ardiani Ika Sulistyawati and Aprilia Qadriatin, "Pengungkapan Sustainability Report Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 4 (2018): 1–22.

⁴⁶ Ananda and Yusnaini, "The Effect Of Board Of Commissioners And Board Of Directors On Sustainability Report Disclosure In Companies Registered On The IDX 2020."

H1 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.7.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Menurut UU PT Pasa 11 No.40 tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Realisasi perencanaan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dapat dipublikasikan melalui laporan keberlanjutan.

Secara berkala dewan direksi mengadakan rapat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan melancarkan komunikasi. Menurut Raharjo “kinerja direksi yang bagus akan dapat menciptakan *good corporate governance* bagi perusahaan”. Bertambah baik kinerja dewan direksi, akan semakin kuat GCG yang diterapkan pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan upaya perusahaan melakukan kewajiban sosial dan mengungkapkannya.⁴⁷

Sesuai dengan teori *stakeholder*, dewan direksi merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam perusahaan semakin seringnya frekuensi rapat dewan direksi menandakan semakin sering pula dewan direksi berdiskusi mengenai informasi yang lebih luas guna mendapatkan legitimasi perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan. Tingginya frekuensi rapat dewan direksi menandakan semakin sering komunikasi yang terjalin, maka semakin baik pula tata kelola yang diterapkan di perusahaan. Jika tata kelola yang baik, menjadikan laporan keberlanjutan dapat diungkapkan dengan baik pula.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Septi Ludianah dan Dirvi Surya Abbas⁴⁸ menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

⁴⁷ Awalia, E. N., Anggraini, R., & Prihatni, R. (2015). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Leverage, dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 10, No. 2.

⁴⁸ Septi Ludianah et al., “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Direksi Terhadap Sustainability Report Disclosure,” *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 1, no. 3 (2022): 41–48.

keberlanjutan.

2.7.3 Pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Komite audit memiliki tanggung jawab pada dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan yang dilakukan manajemen. Atas dasar teori stakeholders disebutkan bahwa manajer perusahaan dapat dimaksimalkan fungsinya melalui adanya dorongan dari komite audit supaya mengungkapkan semua informasi yang dibutuhkan secara transparan. Informasi yang dibutuhkan *stakeholder* salah satunya diwujudkan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat.⁴⁹

Keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas. Laporan keberlanjutan bisa melakukan pengungkapan dapat dilihat kinerja komite audit, yang memiliki tugas menjadi pengawas kepatuhan suatu perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada teori *stakeholder*, perusahaan ingin memenuhi harapan para *stakeholder* dengan membuat laporan keberlanjutan yang mendeskripsikan mengenai aktivitas perusahaan dibidang sosial dan masyarakat sekitar. Dalam penelitian Rosita dan Syifa⁵⁰ menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

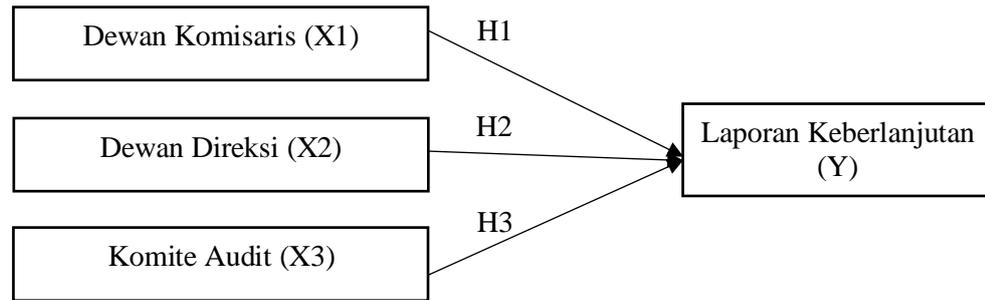
2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual/kerangka berpikir adalah hasil dan sintesis, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian

⁴⁹ Devi Istiani Roviqoh and Muhammad Khafid, "Profitabilitas Dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report," *Business and Economic Analysis Journal* 1, no. 1 (2021): 14–26.

⁵⁰ Wulandari, Fauziyah, and Mubarak, "Pengaruh Komite Audit Dan Struktur Modal Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berdasarkan suatu motivasi dan minat tertentu, yang artinya akan mempengaruhi kinerja individu tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti tentang Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang ada pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dengan adanya ukuran dewan komisaris, kinerja dewan direksi serta kinerja komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Sesuai dengan praduga hipotesis yaitu, semakin tinggi ukuran dewan komisaris, semakin tinggi frekuensi rapat dewan direksi dan semakin tinggi tingkat frekuensi rapat komite audit dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan pada setiap perusahaan publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif hubungan kausal, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel atau menganalisis pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada perusahaan yang listing di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Sumber data yang peneliti gunakan dari laman <https://www.idx.co.id/id> untuk mencari konsistensi perusahaan yang listing di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) dari tahun 2020-2023. Web perusahaan yang menjadi populasi penelitian ini, untuk memastikan bahwa perusahaan telah membuat laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara konsisten dari tahun 2020-2023.

Melalui laporan tahunan (*annual report*) peneliti mendapatkan data ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan direksi dalam satu tahun, frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun. Kemudian melalui laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang telah di *publish* perusahaan pada web, peneliti dapat melihat SRDI (*Sustainability Report Disclosure Index*) yang akan menentukan besarnya variabel dependen.⁵¹

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau objek dimana anda ingin menggeneralisasikan hasil penelitian. Populasi juga dapat diartikan seluruh kelompok yang diminati untuk dijadikan objek penelitian.⁵² Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu populasi homogen. Populasi homogen merupakan keseluruhan perusahaan memiliki sifat atau karakteristik yang relatif sama dengan lainnya. Jadi dalam penelitian ini, menggunakan seluruh perusahaan yang konsisten listing di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2020-2023. Dari hasil pencarian peneliti terdapat 356 perusahaan yang konsisten listing di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2020-2023.

⁵¹ Yenny Purbandari and Ratna Suryani, "Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting 242 Fokus Ekonomi Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting," *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 16, no. 1 (2021): 242–254, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15699>.

⁵² I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, ed. Erang Risanto (Penerbit ANDI, 2022).

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Selain itu, sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan dan masalah penelitian. Jumlah perusahaan yang konsisten terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2020-2023 sebanyak 356 perusahaan.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan diambil dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang konsisten terdaftar di ISSI pada tahun 2020-2023. Hasil penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1
Penentuan Kriteria Sampel

No.	Kriteria Penetapan Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Seluruh perusahaan yang konsisten listing di ISSI periode 2020-2023	356
2	Web perusahaan yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti	(110)
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti	(34)
4	Perusahaan yang tidak konsisten mengungkapkan laporan keberlanjutan periode 2020-2023	(173)
5	Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini	39
6	Jumlah sampel pada penelitian ini 39 perusahaan dikali 4 tahun sebagai jangka waktu penelitian	156

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 3.1 data diolah peneliti perusahaan yang konsisten listing di ISSI (Indeks Dsaham Syariah Indonesia) terdapat populasi 356 perusahaan, sampel yang di dapatkan sesuai dengan kriteria sejumlah 39 perusahaan. Melalui 39 perusahaan yang menjadi sampel dikali dengan 4 tahun (2020-2023) sebagai rentang waktu penelitian ini. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 156.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 2

Variable, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Skala
Variabel Dependen			
1.	Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	Pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang terpisah dari <i>annual report</i> .	Nilai 0 = tidak melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Nilai 1 = melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. ⁵³
Variabel Independen			
2.	Dewan Komisaris	Organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.	Jumlah anggota komisaris dalam satu tahun ⁵⁴
3.	Dewan Direksi	Organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan.	Jumlah frekuensi rapat dewan direksi dalam satu tahun ⁵⁵
4.	Komite Audit	Komite yang ditunjuk	Jumlah frekuensi rapat

⁵³ Aniktia and Khafid, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report.”

⁵⁴ Wahyuni Sri Aliniar Dwita, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI,” *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1 XV, no. 1 (2017): 26–41, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1377>.

⁵⁵ Purbandari and Suryani, “Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting 242 Fokus Ekonomi Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting.”

		oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen.	komite audit dalam satu tahun. ⁵⁶
--	--	---	--

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdapat dua (2) jenis yaitu data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti terkait variabel yang diminati untuk tujuan tertentu dari penelitian ini disebut sebagai data primer. oleh peneliti terkait variabel tertentu yang diminati oleh penelitian ini. Sumber data yang dapat digunakan dalam data primer ialah dapat menggunakan responden individu, kelompok fokus, dan internet jika kuesioner disebarkan secara online.
2. Data Sekunder adalah data yang berkaitan dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder mencakup publikasi pemerintah, catatan atau dokumentasi perusahaan, analisis media mengenai industri, situs web, internet, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang konsisten listing di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2020-2023. Data penelitian dalam laporan ini berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada setiap perusahaan yang menjadi populasi. Data ini di dapat atau dicari pada web perusahaan yang bisa diakses oleh peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis data untuk menguji generalisasi hasil yang didasarkan atas satu sampel.⁵⁷ Analisis Deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana

⁵⁶ Aniktia and Khafid, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report."

⁵⁷ Iqbal Hasan Misbahuddin, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, ed. Suryani, Edisi Kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada Perusahaan yang konsisten listing di ISSI pada tahun 2020-2023. Dalam analisis deskriptif peneliti akan mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata (*mean*).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis deskriptif yaitu:

1. Menentukan jumlah anggota dewan komisaris setiap tahun dari 2020-2023, data ini didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*).
2. Menentukan jumlah frekuensi rapat dewan direksi pada setiap tahun 2020-2023, data ini didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*).
3. Menentukan frekuensi rapat komite audit pada setiap tahun 2020-2023, data ini didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak Menurut.⁵⁸ Uji Normalitas adalah metode penting dalam analisis data untuk menilai apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini memanfaatkan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji apakah sampel data yang diperoleh memiliki distribusi normal atau tidak.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.⁵⁹ Dalam penelitian ini memanfaatkan Uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan nilai absolut residual dengan nilai variable independen.⁶⁰ Salah satu uji untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai mutlak residual terhadap variabel bebas

⁵⁸ Juliandi Azuar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke. (Medan: Umsu Press, 2015).

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Zaini Iskandar, Askar Jaya, Rini Wartu, *Stastistik Pendidikan*, ed. Moh. Nasrudin (Pekalongan: PT. Nasya Expending Management, 2022).

x yang dianggap berkaitan dengan varians heteroskedastisitas. Data yang layak diuji seharusnya terbebas dari heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian dari error suatu pengamatan kepengamatan lain terjadi ketidak samaan (tidak konstan).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya pada model regresi linier yang dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi.⁶¹ Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara serangkaian data observasi yang uraikan menurut runtut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross-section*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukam dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Waston*.⁶² Uji *Durbin-Waston* merupakan uji statistik yang cukup populer dan tersedia sebagai software statistik, seperti SPSS, Eviews dan software statistik lainnya. Kepopuleran uji ini karena kemudahannya dalam teknik perhitungannya.⁶³

3.5.2.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen.⁶⁴ Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen, karena data dipakai penulis merupakan data panel. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Uji menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model ini dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut penjelasannya :

1. Berdasarkan Nilai Tolerance

Tolerance > 0,10 = tidak terjadi multikolonieritas

Tolerance < 0,10 = terjadi multikolonieritas

⁶¹ M. Nisfiannoor, *Pendekatan Statistika Modren Untuk Ilmu Sosial*, ed. Aulia Nur Dini (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

⁶² Fransiscus Xaverius Pudjo Wibowo, *Statistika Bisnis Dan Ekonomi Dengan SPSS 25*, ed. Tri Utami Akliia Suslia (Jakarta: Salemba Empat, 2022).

⁶³ Pray P.H. Nadeak Nursiyono, Joko Ade, *Setetes Ilmu Regresi Linier* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2016).

⁶⁴ Azuar, *Metodologi Penelitian Bisnis*.

2. Berdasarkan Nilai VIF

$VIF < 10,00$ = tidak terjadi multikolonieritas

$VIF > 10,00$ = terjadi multikolonieritas.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Rumus regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Laporan Keberlanjutan

X1 : Dewan Komisaris

X2 : Dewan Direksi

X3 : Komite Audit

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

e : Standar Error

Besarnya konstanta dan besarnya koefisien regresi pada setiap masing-masing variable independent yang ditunjukkan X1, X2, X3. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan terhadap variable independent dengan variable dependennya.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Kelemahan koefisien determinasi adalah bias terhadap variabel terikat yang ada dalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 untuk mengevaluasi model regresi.

Dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 yang berkisar antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 maka menunjukkan pengaruh variabel independen semakin kuat terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 semakin mendekati 0 menunjukkan

bahwa pengaruhnya semakin lemah.⁶⁵ Semakin dekat suatu model dapat menjelaskan perilaku variable dependen, semakin besar proporsi R^2 atau mendekati 100.

3.5.3.3 Uji Statistik f

Uji statistik atau uji simultan menunjukkan apakah semua variable independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap dengan F table dan nilai signifikan dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dalam uji statistik ini dapat dilihat semua variabel penelitian yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit apakah dapat mempengaruhi laporan keberlanjutan secara bersama-sama. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3.4 Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji statistik t atau uji persial menunjukkan seberapa jauh pengaruh variable independent secara individual dalam menerangkan variasi variable independent. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri).⁶⁶ Kriteria pengujian ini menggunakan nilai t hitung dibandingkan dengan t table dan nilai signifikan dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$.

X1 : Dewan Komisaris

X2 : Dewan Direksi

⁶⁵ Nawari, *Analisis Regresi Dengan Ms Excel 2007 Dan SPSS 2017*, ed. Teguh Wahyono (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).

⁶⁶ Darma Budi, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

X3 : Komite Audit

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
3. Nilai koefisien beta (B) harus searah dengan hipotesis yang diajukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan yang menjadi sampel pada rentang waktu penelitian (2020-2023). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang telah konsisten melaporkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2020-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mana menghasilkan data sejumlah 156 sampel. Seluruh data ini di ambil dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan yang telah di publikasikan pada web perusahaan. 39 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 4. 1

Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
3	ADRO	Adaro Energy Tbk
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk
5	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk
6	ASGR	Astra Graphia Tbk
7	BISI	BISI International Tbk
8	BRAM	Indo Kordasa Tbk
9	CPIN	Chareon Pokphand Indonesia Tbk
10	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk
11	CTRA	Ciputra Development Tbk
12	ELSA	Elnusa Tbk
13	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
14	EXCL	XL Axiata Tbk
15	GGRP	Gunung Raja Paksi Tbk
16	HERO	Hero Supermarket Tbk
17	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk

18	INCO	Vale Indonesia Tbk
19	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
20	IPCC	Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
21	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk
22	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
23	ITMG	Indo Tambagraha Megah Tbk
24	KEEN	Kencana Energi Lestari Tbk
25	KLBF	Kalbe Farma Tbk
26	LTLS	Lautan Luas Tbk
27	PTBA	Bukit Asam Tbk
28	PTPP	PP (Persero) Tbk
29	PTRO	Petrosea Tbk
30	PWON	Pakuwon Jati Tbk
31	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
32	SILO	Siloam International Hospitals Tbk
33	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
34	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
35	TLKM	Telkom Indonesia Tbk
36	UNTR	United Tractors Tbk
37	VICI	Unilever Indonesia Tbk
38	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk
39	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk

4.2 Hasil Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada variabel studi kasus pada perusahaan yang konsisten listing di ISSI periode 2020-2023 meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, serta pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasilnya ditunjukkan dibawah ini :

Tabel 4. 2

Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	156	2.00	11.00	5.281	1.953
Dewan Direksi	156	12.00	86.00	24.711	17.024
Komite Audit	156	2.00	43.00	9.288	7.628
Laporan Keberlanjutan	156	0.22	0.85	0.499	0.127
Valid N (listwise)	156				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan analisis dan hasil statistik deskriptif yang tampak pada Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel berjumlah sama yaitu 156 sampel. Nilai maksimum menunjukkan kisaran nilai terbesar yang ada dalam penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan kisaran nilai terkecil yang ada dalam penelitian. Nilai rata-rata menunjukkan kisaran nilai dari total nilai masing-masing variabel dibagi jumlah sampel. Sedangkan standart deviasi menunjukkan simpangan data yang ada dalam penelitian.

Hasil analisis statistik deskriptif sesuai dengan tabel 4.2 diperoleh bahwa nilai minimum 2, hal ini berarti anggota dewan komisaris terendah pada sampel penelitian ini. Adapun dewan komisaris memperoleh nilai maksimum 11 anggota pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan nilai *mean* atau rata-rata yang diperoleh 5.28 atau 5 anggota dewan komisaris pada perusahaan sampel penelitian. Dan standar deviasi yang diperoleh yaitu 1.95.

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif pada tabel 4.2 dewan direksi memperoleh nilai minimum 12, yang diartikan frekuensi rapat paling sedikit dalam periode penelitian. Sedangkan nilai maksimumnya yaitu 86 kali rapat dewan direksi dalam setahun, pada perusahaan yang menjadi sampel. Sementara *mean* atau rata-rata yang diperoleh dewan direksi sebesar 24.71 yang artinya rata-rapat yang dilakukan sebanyak 24 kali dalam satu periodenya. Standar deviasi sebesar 17.02 yang di peroleh dewan direksi.

Hasil dari analisis deskriptif pada table 4.2 menjelaskan bahwa komite audit memperoleh nilai minimum sebesar 2, hal ini merupakan jumlah rapat komite audit terendah yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode penelitian. Adapun nilai maksimum dari komite audit yaitu, 43 yang menjelaskan frekuensi rapat tertinggi pada periode penelitian. Sedangkan rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 9.28, atau dapat disimpulkan rata-rata rapat komite audit dalam periode penelitian sebanyak 9 kali rapat. Sementara nilai standar deviasi sebesar 7.62 yang di peroleh komite audit.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui pola sebaran data dalam penelitian. Uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan sidtribusi normal baku merupakan konsep dasar daru uji normalitas *Kolmogorov-*

Smirnov (KS).⁶⁷ Kriteria penerimaan data dikatakan berdistribusi normal adalah dengan membandingkan besarnya nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05.

Tabel 4. 3
Uji Normalitas
One-Sample Kormogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.12127258
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0.053
	Positive	0.053
	Negative	-0.043
Test Statistic		0.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Semirnov* (KS) diperoleh *Asymp.Sig* sebesar 0,200 lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Menurut aturan *Kolmogorov Semirnov*, jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika nilai Probabilitas $< H_0$ ditolak (berdistribusi tidak normal). Artinya data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah sebuah cara pengujian yang diterapkan melalui analisis regresi agar dapat mengevaluasi bagaimana variasi (*variance*) dari satu observasi ke observasi lainnya tidak konsisten. Jika perbedaan yang signifikan antara variabel bebas dan kesalahan prediksi (residual) tidak terdeteksi yaitu, signifikan lebih besar dari (>0.05), sehingga model regresi dianggap tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai

⁶⁷ Ali Sahab, *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik Dengan SPSS* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).

signifikan lebih kecil dari (<0.05) maka terindikasi adanya gejala heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian ini, peneliti menggunakan metode Uji Glejser.

Tabel 4. 4

Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.090	0.018		5.000	0.000
	Dewan Komisaris	-0.002	0.003	-0.042	-0.511	0.610
	Dewan Direksi	0.000	0.000	0.095	1.065	0.288
	Komite Audit	0.001	0.001	0.066	0.758	0.450
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.4 dengan uji glejser diatas dapat diketahui bila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari (0.05). Berdasarkan kriteria pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser di dapat bila asumsi homokedastisitas terpenuhi yang ditunjukkan dengan nilai sig $>$ (0.05). Maka hasil perolehan ini menegaskan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa, variasi dari satu riset ke riset yang lain dalam model tidak bervariasi secara tidak konsisten terhadap variabel independen yang ada.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam period t dan kesalahan pengganggu dalam periode t-1 dalam model linear regression. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi maka perlu dilihat tabel *Durbin-Watson* dengan jumlah variabel bebas (k) dan jumlah data (n) sehingga dapat diketahi dL dan dU, setelahnya dapat diperoleh distribusi daerah keputusan atau tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW) pada model summary yang mana data dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai $dU < dw < 4-dU$. Dalam pengujian dengan variabel moderasi rawan dengan asumsi autokorelasi.

Tabel 4. 5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	0.100	0.082	0.12246	2.037
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi					
b. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan					

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 4.5 dengan nilai DW yang ditunjukkan sebesar 2.037. Diperoleh dari tabel diatas nilai durbin watson sama jumlah variabel independen, diketahui jika $n = 156$ dengan 3 variabel bebas. Maka di dapat nilai dU 1.7776 dan diketahui nilai dL 1.6992. Sesuai dengan rumus terkait uji $dU < dw < 4-dU$ ($1.7776 < 2.037 < 2.224$). Dapat diketahui bila kriteria bebas autokorelasi terpenuhi dengan $du < dw < 4-du$. Artinya data terbebas autokorelasi yang mana tidak ada korelasi yang terjadi antara residual pengamatan satu dengan residual pengamatan lain. Maka penelitian ini dapat dengan layak untuk dilanjutkan.

4.2.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji variabel satu dengan yang lainnya apakah ditemukan korelasi yang tinggi antar variabel atau tidak. Jika tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel independen maka dapat dikatakan model indikator regresi yang digunakan adalah baik. Kriteria penerimaan data terbebas dari multikolinearitas adalah jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 10\%$ atau 0,1.

Tabel 4. 6
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris	0.957	1.045	tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Direksi	0.807	1.239	tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	0.840	1.190	tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit memiliki besaran nilai VIF < 10 dan besarnya nilai tolerance > 0,1 atau 10%. Artinya tidak ada korelasi yang terlalu tinggi diantara variabel independen, maka dapat dikatakan bila model penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Maka peneniliat dapat dilanjutkan dalam menguji data.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Studi kasus perusahaan yang listing di ISSI pada tahun 2020-2023). Di bawah ini hasil dari pengujian regresi linear berganda.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.400	0.031		12.945	0.000
Dewan Komisaris	0.019	0.005	0.286	3.633	0.000
Dewan Direksi	0.001	0.001	0.088	1.026	0.307
Komite Audit	-0.002	0.001	-0.096	-1.147	0.253

a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Dari tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut; Variabel dewan komisaris mempunyai nilai koefisien sebesar 0.286, variabel dewan direksi mempunyai nilai koefisien sebesar 0.088, dan variabel komite audit mempunyai nilai koefisien -0.096. Nilai-nilai tersebut terdapat pada tabel hasil analisis regresi linier berganda di atas.

$$Y = 0.400 + 0.019 X1 + 0.001 X2 - 0.002 X3 + e$$

Keterangan :

Y : Laporan Keberlanjutan

X1 : Dewan Komisaris

X2 : Dewan Direksi

- X3 : Komite Audit
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
e : Standar Error

Interpretasi dari hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta dari persamaan regresi adalah 0.044. Jika kita asumsikan bahwa semua independen variabel adalah nol (0), maka nilai konstanta persamaan regresi adalah 0.400. Dalam konteks yang lebih spesifik, ini menunjukkan titik awal dari garis regresi, di mana variabel dependen akan memulai nilai yang berada pada 0.400 sebelum mempertimbangkan pengaruh dari variabel independen lainnya.

2. Dewan Komisaris (X1) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Nilai koefisien untuk jumlah anggota dewan komisaris (X1) sebesar 0.019 dengan nilai positif. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 1 kali akan mengakibatkan peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar 0.019.

3. Dewan Direksi (X2) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Nilai koefisien untuk frekuensi rapat dewan direksi (X2) sebesar 0.001 dengan nilai positif. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan frekuensi rapat dewan direksi sebesar 1 kali akan mengakibatkan peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar 0.001.

4. Komite Audit (X3) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Nilai koefisien untuk frekuensi rapat komite audit (X2) sebesar -0.002 dengan nilai negatif. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan frekuensi rapat komite audit sebesar 1 kali akan mengakibatkan penurunan pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar -0.002.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan model menjelaskan variasi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel

dependen. Semakin tinggi nilai R² menunjukkan semakin besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai adjusted R square hal ini karena dalam penelitian menggunakan lebih dari dua variabel. Jika nilai R² mendekati 1 menunjukkan kuatnya hubungan variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya jika R² mendekati 0 maka menandakan lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4. 8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.317 ^a	0.100	0.082	0.12246
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi				
b. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi seperti pada Tabel 4.8 diatas, diketahui besarnya nilai adjusted R square pada persamaan sebesar 0.082 atau 8.2%. Artinya, sebesar 8.2% variasi pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dijelaskan melalui variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Faktor lain diluar penelitian yang tidak termasuk dalam analisis ini mungkin memberikan kontribusi sekitar 91.8%. Dari uji diatas menunjukkan lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen, karena hanya mendapat nilai sebesar 0.082 yang artinya berpengaruh hanya 8.2% saja, selebihnya faktor lain diluar penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Hasil pengujian uji F terlihat pada tabel anova yang ditunjukkan melalui besaran nilai sig dan F hitung. Kriteria penerimaan pengujian ini apabila nilai signifikansi $< \alpha$ (0.05) yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $> \alpha$ (0.05) artinya secara silmultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 9
Uji Statistik F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.254	3	0.085	5.643	.001 ^b
	Residual	2.280	152	0.015		
	Total	2.533	155			
a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan						
b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi						

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Hasil uji F pada tabel 4.9 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5.643 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,66. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0.001 lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05 ($0.001 < 0.05$). Artinya secara simultan variabel-variabel independen (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit) secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

4.2.3.4 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variable independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Uji t digunakan pada penelitian yang memiliki satu atau lebih variabel independen.⁶⁸ Maka melalui uji ini, peneliti dapat mengetahui hubungan antara dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dan hubungan anantara komite audit dengan pangungkapan laporan keberlanjutan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁶⁸ Budi, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)*.

Tabel 4. 10
Uji Statistik T (Uji Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.400	0.031		12.945	0.000
	Dewan Komisaris	0.019	0.005	0.286	3.633	0.000
	Dewan Direksi	0.001	0.001	0.088	1.026	0.307
	Komite Audit	-0.002	0.001	-0.096	-1.147	0.253
a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan						

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Menurut tabel 4.10, hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1), “Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan”. Dalam uji t parsial faktor dewan komisaris mempunyai nilai signifikansi (sig) sebesar 0.000 dan nilai t sebesar 3.633. Karena nilai sig lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0.05$), maka $0.000 < 0.05$ dan hipotesis nol ditolak. Dapat diartikan bahwa faktor dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Hipotesis kedua (H2), “Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan”. Dalam uji t parsial faktor dewan direksi mempunyai nilai signifikansi (sig) sebesar 0.307 dan nilai t sebesar 1.026. Karena nilai sig lebih besar dari level signifikansi ($\alpha = 0.05$), maka $0.307 > 0.05$ dan hipotesis nol diterima. Dapat diartikan bahwa faktor dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. Hipotesis ketiga (H3) “Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan”. Dalam uji t parsial faktor komite audit mempunyai nilai signifikansi (sig) sebesar 0.253 dan nilai t sebesar -1.147. Karena nilai sig lebih besar dari level signifikansi ($\alpha = 0.05$), maka $0.253 > 0.05$ dan hipotesis nol diterima. Dapat diartikan bahwa faktor komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris (X1) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Berdasarkan penelitian yang telah diuji, setiap kenaikan jumlah anggota dewan komisaris berdampak positif dan signifikan pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, setiap kenaikan anggota dewan komisaris sebesar 1% maka menyebabkan meningkatnya pengungkapan laporan sebesar 0.019. Ukuran dewan komisaris memiliki potensi dalam meningkatnya pengungkapan laporan keberlanjutan. Dikarenakan jumlah anggota komisaris yang semakin meningkat dapat mengawal pengungkapan sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Menurut hasil penelitian, nilai signifikansi sebesar 0.000 untuk pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Karena nilai sig lebih kecil dari nilai level signifikansi ($\alpha = 0.05$), maka hipotesis nol (H_0) di tolak. Artinya faktor dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham dengan mengemban tugas sebagai pengawas terhadap dewan direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas, maupun minoritas.⁶⁹ Jumlah anggota atau ukuran dewan komisaris yang semakin banyak, maka akan semakin baik pula dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi sebagai pengelola perusahaan. Bersama dewan komisaris, mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* untuk tetap menjalin kerjasama.

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan sesuai dengan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 111 ayat (1).⁷⁰ Dengan begitu kedudukan dewan komisaris tetap independen tanpa bisa dipengaruhi oleh kekuasaan siapapun. Ukuran dewan komisaris juga ditentukan dalam RUPS, untuk tetap menjadi pengawas pengelolaan perusahaan. Sehingga hak dan kepentingan setiap *stakeholder* dapat terpenuhi dengan transparansi, seperti laporan keuangan dan laporan

⁶⁹ James Simanjuntak Sidharta Utama, Fitriany Amarullah, Sylvia Veronica Siregar, Yan Rahadian, Cynthia Afriani Utama, *Tata Kelola Korporat Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023).

⁷⁰ Munir Fuady, S.H., M.H., *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*.

keberlanjutan (*sustainability report*). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang besar dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Semakin besar atau dominan proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat memberikan power untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan pelaporan perusahaan.⁷¹

Setiap anggota dewan komisaris sudah sepatutnya memiliki kewajiban dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab atas tugas pengawasan serta pemberian nasihat kepada dewan direksi. Oleh karena itu, setiap anggota dewan komisaris dapat memberi nasihat untuk kebijakan perusahaan yang dikelola oleh direksi. Dengan begitu semakin tinggi ukuran dewan komisaris memberi pengaruh terhadap luasnya pelaporan dimana salah satunya yaitu laporan keberlanjutan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Rana Fatimah Ananda dan Yusnaini⁷² yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Dimana tingginya anggota dewan komisaris bisa memberikan pengawasan yang lebih terhadap manajemen perusahaan untuk memberikan hak keterbukaan informasi. Dewan komisaris dengan tugasnya mengawasi dewan direksi sebagai pengelola perusahaan ternyata mampu memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

4.3.2 Pengaruh Dewan Direksi (X2) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Dewan direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Pengurusan perusahaan dipertanggungjawabkan oleh direksi melalui laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan. Selain laporan tahunan perusahaan juga dapat memberika pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungan, melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan agar mendapat untung dan memastikan kesinambungan usaha. Tugas utama direksi dalam rangka mengelola perusahaan adalah kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dipenuhi untuk mempertahankan kesinambungan usaha.

⁷¹ Sulistyawati and Qadriatin, "Pengungkapan Sustainability Report Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya."

⁷² Ananda and Yusnaini, "The Effect Of Board Of Commissioners And Board Of Directors On Sustainability Report Disclosure In Companies Registered On The IDX 2020."

Dalam penelitian ini, variabel dewan direksi pada uji T parsial memiliki nilai signifikansi senilai 0.307. Karena signifikansi ini diatas level signifikansi ($\alpha = 0.05$), sehingga hipotesis nol diterima. Hal ini mengindikasikan faktor dewan direksi tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap laporan keberlanjutan. Dengan demikian, dapat dijelaskan yang mana kinerja dewan direksi tidak memberikan dampak yang penting untuk pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hasil uji hipotesis menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara kinerja dewan direksi dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada hasil penelitian ini tentu tidak sejalan dengan teori *stakeholder*, dimana semakin berkualitas keberadaan dewan direksi akan lebih luas pemahaman strategis pengungkapan laporan untuk para pemangku kepentingan.

Walaupun tingkat frekuensi rapat dewan direksi tinggi, namun pada uji penelitian ini tidak ada hubungan dengan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Karena dengan tingginya frekuensi rapat tidak sepenuhnya membahas perihal laporan keberlanjutan. Seberapa sering dewan direksi rapat tidak menjadi tolak ukur bahwa suatu perusahaan akan melakukan pengungkapan keberlanjutan. Karena fokus kerja dari dewan direksi pada seluruh pengelolaan perusahaan oleh karena itu, hal ini terlihat intensitas rapat dewan direksi yang lebih banyak membahas kinerja keuangan serta manajemen perusahaan dibandingkan laporan keberlanjutan.

Kinerja dewan direksi tidak hanya diukur dari seberapa seringnya direksi menyelenggarakan rapat, presentase rapat anggota juga berpengaruh terhadap kualitas rapat yang dilaksanakan. Kompetensi dewan direksi juga memberi pengaruh terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan. Luasnya tugas dan tanggungjawab dewan direksi menjadikan tidak optimal kinerja yang dilakukan.

Penelitian ini di dukung oleh peneliti sebelumnya Yanzil Azizil Yudaruddin dan Kuswardani Chandra Pratiwi⁷³ yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hal ini dikarenakan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Hal yang sama juga diungkap oleh penelitian terdahulu Yenny Purbandari dan Ratna Suryani⁷⁴ yang juga menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Bahwa

⁷³ Yanzil Azizi Yudaruddin and Kuswardani Chandra Pratiwi, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019)," *Journal of Accounting Taxation and Finance* (2020): 46–55.

⁷⁴ Purbandari and Suryani, "Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting 242 Fokus Ekonomi Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting."

tugas serta tanggung jawab sosial yang dimiliki dewan direksi menjelaskan bahwa dewan direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Di dukung oleh penelitian Dessy Noor Farida dan Ali Imron⁷⁵ yang menyatakan bahwa variabel aktivitas dewan direksi yang diukur dengan jumlah rapat dewan direksi dalam setahun tidak dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada salah satu perusahaan sampel PT Astra Agro Lestari, terlihat dalam struktur organisasi terdapat VP *Sustainability*, yang menandakan bahwa perusahaan ini sudah melek akan keberlanjutan yang ditunjukkan dengan adanya VP *Sustainability*. Dengan adanya VP *Sustainability* akan ada perencanaan serta fokus terhadap pengungkapan keberlanjutan. Kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi lebih efektif jika memiliki penanggungjawab tersendiri.

Selain itu, dewan direksi lebih berfokus pada informasi utama yang diinginkan pasar, yaitu kinerja keuangan, bukan informasi yang terkait dengan kegiatan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat dewan direksi, maka semakin rendah pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, kepedulian masyarakat Indonesia terhadap masalah lingkungan masih rendah, sehingga jika informasi yang diungkapkan terlalu banyak, akan menghalangi investor untuk menangkap informasi secara efektif.⁷⁶

Teori *stakeholder* di implementasikan dalam penerapan *good corporate governance* dimana mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Penerapan teori *stakeholder* dalam *good corporate governance* dapat dilihat dengan jelas pada munculnya tanggung jawab sosial yang menekankan perhatian terhadap manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari *good corporate governance*. Akan tetapi terdapat kritik atas teori *stakeholder* yang digunakan dalam penerapan *good corporate governance*.⁷⁷ Kritik yang datang dari kalangan cendekiawan dan ekonom islam yang berpendapat bahwa konsep *good corporate governance* konvensional menggunakan *stakeholder* yang memiliki kekurangan fundamental. Bahwa teori tersebut belum mencapai hubungan mendasar dalam kehidupan, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan.

⁷⁵ Dessy Noor Farida and Ali Imron, "Do Board Attributes Influence Islamic Social Responsibility Disclosure? Evidence from Indonesian Sharia Banking" 4, no. 1 (2022): 1–24.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam*, ed. Erlita Ridanasti (Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020).

Jika dewan direksi memiliki pandangan perspektif islam, maka perusahaan tidak hanya memaksimalkan keuntungan semata melainkan lebih bertujuan pada kesejahteraan umat. Bahwa alam yang dimanfaatkan dalam melakukan bisnis itu adalah milik Tuhan yang memang harus dilestarikan. Diperbolehkan dalam kebermanfaatannya namun juga harus dijaga serta dirawat. Jangan sampai keserakahan yang diterapkan demi keuntungan pribadi dan golongan.

Hubungan yang mendasar pada kehidupan yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Jika para pemangku memiliki kesadaran penuh serta memiliki hubungan dan keyakinan dengan Tuhan, maka laporan keberlanjutan dapat dengan mudah diungkapkan oleh suatu perusahaan. Karena memiliki orientasi kesejahteraan umat serta menjaga alam yang dimiliki-Nya. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi kinerja dari dewan direksi, sehingga dengan pengukuran frekuensi rapat saja dirasa kurang cukup dalam menetapkan pengungkapan laporan keberlanjutan.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit (X3) terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y)

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.⁷⁸ Komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi.

Dalam penelitian ini, variabel dewan direksi pada uji T parsial memiliki nilai signifikansi senilai 0.253. Karena signifikansi ini diatas level signifikansi ($\alpha = 0.05$), sehingga hipotesis nol diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori stakeholder, semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan

⁷⁸ Yudaruddin and Pratiwi, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019)."

informasi dan apa yang dibutuhkan stakeholder secara luas. Oleh karena itu, melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan (GCG) *good corporate governance*.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* diartikan bahwa sering atau tidaknya komite audit melakukan rapat pada perusahaan tidak selalu menjadi tolak ukur pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan rapat komite audit rata-rata 9 kali dalam satu tahun. Rata-rata 9 kali rapat yang dilaksanakan komite audit cukup besar dibandingkan minimum rapat yang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 13 bahwa komite audit minimal mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan atau 4 kali rapat dalam setahun. Dalam rata-rata frekuensi rapat 9 kali dalam jangka waktu satu tahun komite audit lebih berfokus dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dibanding pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), hal ini berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menjadi salah satu tujuan komite audit.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu Wanda Adila dan Efrizal Syofyan⁷⁹ menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Kemungkinan karena rapat-rapat yang dilakukan kurang efektif dan mengesampingkan pengungkapan informasi sosial. Hal yang sama juga diungkap oleh penelitian terdahulu Yanzil Azizil Yudaruddin dan Kuswardani Chandra Pratiwi⁸⁰ yang juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Tingginya frekuensi rapat komite audit belum tentu menandakan kualitas rapat yang telah diselenggarakan. Prosentase kehadiran komite audit menunjukkan kualitas rapat yang dihasilkan. Karena rapat yang dilaksanakan kurang efektif. Lebih baik jika dalam perusahaan memiliki penanggungjawab tersendiri mengenai keberlanjutan yang akan diterapkan pada instansi. Karena dengan begitu dapat mendorong terciptanya keberlanjutan

⁷⁹ Adila, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014."

⁸⁰ Yudaruddin and Pratiwi, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019)."

serta efektifitas dalam pengungkapan. Dengan pemberian jobdesk yang terarah dan terencana dapat mempermudah dalam pengungkapan. Jika suatu perusahaan belum memiliki perencanaan yang terfokus dalam pelaporan keberlanjutan dapat menghambat pengungkapan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), studi kasus perusahaan yang listing di ISSI pada tahun 2020-2023 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa dewan komisaris adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Semakin tinggi jumlah anggota dewan direksi dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Karena semakin banyak jumlah anggota dewan direksi dapat lebih ketat untuk melakukan pengawasan terhadap dewan direksi selaku pengelola penuh perusahaan.
2. Variabel dewan direksi tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Ini menunjukkan bahwa dewan direksi bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi tidak dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, karena fokus kerja dewan direksi tidak hanya pada pelaporan lingkungan sosial. Melainkan untuk seluruh pengelolaan atau manajemen pada perusahaan. Sehingga dewan direksi harus mempunyai rancangan khusus untuk bisa melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Dewan direksi dapat membentuk tim khusus agar perencanaan dan pelaksanaan pengungkapan laporan keberlanjutan dapat berjalan lebih efektif dalam perusahaan pada setiap tahunnya.
3. Variabel komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Ini menunjukkan bahwa komite audit bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi tidak dapat memberi pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Mengacu pada *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan komite audit adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan frekuensi rapat yang tinggi komite audit lebih terfokus dalam melakukan peningkatan

kualitas laporan keuangan dibandingkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Komite audit dapat memberikan arahan untuk penganggaran kegiatan keberlanjutan setiap tahunnya pada perusahaan

Selain itu, hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa secara bersamaan, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini sampel terbatas, hanya pada Perusahaan yang konsisten listing di ISSI. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas sampel sehingga penelitian yang dijangkau lebih luas.
2. Rendahnya adjusted R² dari model yang telah diuji dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada Perusahaan, sehingga penelitian selanjutnya lebih baik untuk menggunakan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya lebih baik memperluas periode pengamatan agar lebih menggambarkan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia.
4. Perusahaan sampel dalam penelitian ini dan Perusahaan publik secara umum, harus memastikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dewan direksi wajib menggerakkan setiap unsur perusahaan untuk menyusun dan mengungkap laporan keberlanjutan. Agar lebih efektif dewan direksi dapat membuat tim khusus untuk bertanggungjawab atas pelaporan keberlanjutan. Dewan komisaris berperan untuk memastikan dewan direksi melaksanakan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Serta memberikan teguran apabila dewan direksi belum melakukan pelaporan keberlanjutan. Komite audit melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penganggaran kegiatan keberlanjutan pada tahun berikutnya, apabila perusahaan belum memiliki anggaran terkait hal tersebut.
5. Pemerintah mengimplementasikan tindak tegas pemberian sanksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Merevisi sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang belum

melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Misalkan dengan mencabut izin, karena Perusahaan belum mentaati peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Wanda. “Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014” (2015): 777–792.
- Adistie Gisti Riza, Maulida Hirdianti Bandi. “Analisis Faktor Penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards Terhadap Pengungkapan Sosial.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3 (2019): 29–39.
- Aliniar Dwita, Wahyuni Sri. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI.” *KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1 XV*, no. 1 (2017): 26–41. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1377>.
- Ananda, Rana Fathinah, and Yusnaini. “The Effect Of Board Of Commissioners And Board Of Directors On Sustainability Report Disclosure In Companies Registered On The IDX 2020.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 1 (2023): 1014–1021. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.
- Aniktia, Ria, and Muhammad Khafid. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report.” *Accounting Analysis Journal* 4, no. 3 (2015): 1–10.
- Arsan, Anmora, Hasnati, and Fahmi. “Kedudukan Hukum Komisaris Berdasarkan Undang Undang.” *Veritas Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 72–88.
- Azuar, Juliandi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke. Medan: Umsu Press, 2015.
- Budi, Darma. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)*. Guepedia, 2021.
- Dessy Noor Farida, Fajar Adhitya, Fitria Andestri. *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Effendi, M. A. *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Farida, Dessy Noor, and Ali Imron. “Do Board Attributes Influence Islamic Social Responsibility Disclosure ? Evidence from Indonesian Sharia Banking” 4, no. 1 (2022): 1–24.
- Farida, Dessy Noor, and Naili Saadah. “Etika Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Bingkai Al-Qur’an” 7 (2019): 343–366.
- Fatchan, Ilham Nuryana, and Rina Trisnawati. “Pengaruh Good Corporate Governance Pada

- Hubungan Antara Sustainability Report Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Go Public Di Indonesia Periode 2014-2015).” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 25–34.
- Gede Eko Putra Sri Sentanu, Yuniawati Anti Tirani, Gadang Ali Syariati Pradono. *Kolaborasi Dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2024.
- Hasanah, Ni’matul, Dhaniel Syam, and Ahmad Waluya Jati. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Di Indonesia.” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 711–720.
- Iskandar, Askar Jaya, Rini Wartu, Zaini. *Statistik Pendidikan*. Edited by Moh. Nasrudin. Pekalongan: PT. Nasya Expending Management, 2022.
- Josua, Rudolf, and Aditya Septiani. “Anilisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.” *Journal Of Accounting* 9 (2020): 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Edited by Suryani. Edisi Kedu. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. 2nd ed. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Najul, Laskar. “Impact of Corporate Sustainability Reporting on Firm Performance: An Empirical Examination in Asia.” *Journal of Asia Business Studies* 12 (2018): 571–593.
- Natalia, Orien, and Wahidahwati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016): 1–23.
- Nawari. *Analisis Regresi Dengan Ms Excel 2007 Dan SPSS 2017*. Edited by Teguh Wahyono. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Nisfiannoor, M. *Pendekatan Statistika Modren Untuk Ilmu Sosial*. Edited by Aulia Nur Dini. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–267.
- Novitasari, Bunga, Andi Manggala Putra, and Akhmad Saebani. “Artikel Tersedia Pada Sitasi: Artikel Masuk Artikel Diterima.” *Manajemen dan Akuntansi* 24, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1>.
- Nursiyono, Joko Ade, Pray P.H. Nadeak. *Setetes Ilmu Regresi Linier*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2016.
- Pahlevi, Reza Widhar. *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam*. Edited by Erlita Ridanasti.

Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020.

- Purbandari, Yenny, and Ratna Suryani. "Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting 242 Fokus Ekonomi Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 16, no. 1 (2021): 242–254. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15699>.
- Roviqoh, Devi Istiani, and Muhammad Khafid. "Profitabilitas Dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report." *Business and Economic Analysis Journal* 1, no. 1 (2021): 14–26.
- Safitri, Mariya, and Saifudin. "Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report." *Jurnal Bingkai Ekonomi* 4, no. 1 (2019): 13–25.
- Sahab, Ali. *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik Dengan SPSS*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Septi Ludianah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, and Triana Zuhrotun Aulia. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Direksi Terhadap Sustainability Report Disclosure." *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 1, no. 3 (2022): 41–48.
- Sidharta Utama, Fitriany Amarullah, Sylvia Veronica Siregar, Yan Rahadian, Cynthia Afriani Utama, James Simanjuntak. *Tata Kelola Korporat Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023.
- Sofa, Faizah Naila, and Naila WeningTyas Respati. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)." *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 39.
- Sofa, Faizah Naila, and Novita WeningTyas Respati. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)." *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 32–49.
- Suciningtias, Siti Aisyah, and Rizki Khoiroh. "Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)." *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2, no. 1 (2015): 398–412.
- Sulistiyawati, Ardiani Ika, and Aprilia Qadriatin. "Pengungkapan Sustainability Report Dan

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.” *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 4 (2018): 1–22.
- Swarjana, I Ketut. *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Edited by Erang Risanto. Penerbit ANDI, 2022.
- Syafrudin, and Meliana Panjaitan. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) (Studi Kasus Pada Perusahaan BEI Peraih Penghargaan ISRA 2013-2016).” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2020): 45–56. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/download/1399/795/>.
- Wibowo, Fransiscus Xaverius Pudjo. *Statistika Bisnis Dan Ekonomi Dengan SPSS 25*. Edited by Tri Utami Aklia Suslia. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Wulandari, Rosita, Syifa Fauziah, and Ali Mubarak. “Pengaruh Komite Audit Dan Struktur Modal Terhadap Pengungkapan Sustainability Report.” *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 6, no. 02 (2021): 181–193.
- Yudaruddin, Yanzil Azizi, and Kuswardani Chandra Pratiwi. “Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019).” *Journal of Accounting Taxation and Finance* (2020): 46–55.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran Tabel Data

Kode	Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	Laporan Keberlanjutan
AALI	2020	5	50	4	0.5
AALI	2021	4	50	5	0.55
AALI	2022	4	44	4	0.61
AALI	2023	4	46	4	0.61
ACES	2020	4	12	3	0.5
ACES	2021	5	12	4	0.52
ACES	2022	3	12	10	0.63
ACES	2023	5	12	4	0.5
ADRO	2020	5	12	4	0.34
ADRO	2021	5	12	10	0.58
ADRO	2022	5	12	8	0.75
ADRO	2023	5	12	8	0.5
AKRA	2020	5	12	14	0.62
AKRA	2021	3	44	10	0.5
AKRA	2022	3	70	8	0.64
AKRA	2023	8	23	4	0.59
ANJT	2020	8	22	7	0.58
ANJT	2021	4	40	11	0.36
ANJT	2022	4	33	12	0.6
ANJT	2023	3	37	12	0.35
ASGR	2020	4	25	8	0.63
ASGR	2021	3	12	4	0.3
ASGR	2022	7	23	7	0.61
ASGR	2023	3	12	5	0.32
BISI	2020	3	12	5	0.27
BISI	2021	7	22	4	0.79
BISI	2022	4	12	6	0.32
BISI	2023	6	15	5	0.44
BRAM	2020	6	13	6	0.52
BRAM	2021	6	14	6	0.47
BRAM	2022	3	50	8	0.85
BRAM	2023	6	16	7	0.48
CPIN	2020	3	12	25	0.4
CPIN	2021	3	12	26	0.38
CPIN	2022	7	12	7	0.61
CPIN	2023	3	12	35	0.29
CSRA	2020	3	15	5	0.51

CSRA	2021	4	12	26	0.32
CSRA	2022	3	12	5	0.52
CSRA	2023	3	17	5	0.5
CTRA	2020	7	12	8	0.61
CTRA	2021	6	12	7	0.32
CTRA	2022	6	12	7	0.61
CTRA	2023	3	40	16	0.49
ELSA	2020	4	72	14	0.43
ELSA	2021	3	12	5	0.5
ELSA	2022	4	86	24	0.3
ELSA	2023	5	54	23	0.66
ENRG	2020	5	12	4	0.44
ENRG	2021	5	12	4	0.45
ENRG	2022	5	16	4	0.47
ENRG	2023	6	15	4	0.67
EXCL	2020	9	63	8	0.41
EXCL	2021	8	62	8	0.4
EXCL	2022	7	56	13	0.53
EXCL	2023	5	12	4	0.31
GGRP	2020	8	51	11	0.55
GGRP	2021	5	14	9	0.32
GGRP	2022	10	26	4	0.75
GGRP	2023	6	18	11	0.29
HERO	2020	5	19	8	0.42
HERO	2021	9	12	4	0.44
HERO	2022	10	46	6	0.68
HERO	2023	9	12	4	0.49
IMPC	2020	11	12	4	0.61
IMPC	2021	11	12	4	0.44
IMPC	2022	3	12	4	0.46
IMPC	2023	10	42	3	0.59
INCO	2020	3	12	4	0.4
INCO	2021	10	27	6	0.77
INCO	2022	6	24	4	0.4
INCO	2023	7	20	4	0.5
INTP	2020	3	12	4	0.69
INTP	2021	7	22	4	0.52
INTP	2022	4	39	21	0.41
INTP	2023	4	32	17	0.41
IPCC	2020	4	24	24	0.36
IPCC	2021	4	24	24	0.35
IPCC	2022	7	24	6	0.58
IPCC	2023	4	17	16	0.35

IPCM	2020	5	12	2	0.69
IPCM	2021	4	31	18	0.35
IPCM	2022	3	12	4	0.54
IPCM	2023	4	23	18	0.38
ISSP	2020	4	18	14	0.36
ISSP	2021	4	12	2	0.74
ISSP	2022	5	12	6	0.38
ISSP	2023	4	12	4	0.47
ITMG	2020	7	16	12	0.77
ITMG	2021	7	17	12	0.51
ITMG	2022	8	16	6	0.65
ITMG	2023	8	18	15	0.76
KEEN	2020	4	12	4	0.29
KEEN	2021	4	13	4	0.33
KEEN	2022	5	12	4	0.34
KEEN	2023	5	12	4	0.34
KLBF	2020	7	25	4	0.43
KLBF	2021	7	26	6	0.38
KLBF	2022	7	26	8	0.52
KLBF	2023	6	26	8	0.55
LTLS	2020	5	12	4	0.48
LTLS	2021	6	12	4	0.5
LTLS	2022	6	12	4	0.6
LTLS	2023	6	12	9	0.59
PTBA	2020	6	56	26	0.73
PTBA	2021	6	43	31	0.75
PTBA	2022	6	45	21	0.72
PTBA	2023	8	39	34	0.74
PTPP	2020	6	48	12	0.53
PTPP	2021	6	45	11	0.4
PTPP	2022	6	40	28	0.5
PTPP	2023	6	43	24	0.22
PTRO	2020	5	73	4	0.68
PTRO	2021	5	58	8	0.52
PTRO	2022	5	31	5	0.54
PTRO	2023	6	20	9	0.6
PWON	2020	3	12	4	0.42
PWON	2021	3	12	4	0.58
PWON	2022	3	12	4	0.6
PWON	2023	3	12	5	0.6
SIDO	2020	6	12	7	0.47
SIDO	2021	6	12	10	0.47
SIDO	2022	6	12	8	0.46

SIDO	2023	5	12	8	0.61
SILO	2020	6	12	7	0.53
SILO	2021	6	12	5	0.52
SILO	2022	6	12	7	0.49
SILO	2023	5	17	5	0.46
SMCB	2020	3	12	6	0.52
SMCB	2021	4	12	6	0.55
SMCB	2022	4	12	5	0.54
SMCB	2023	3	12	5	0.6
SMSM	2020	2	29	7	0.36
SMSM	2021	2	21	7	0.38
SMSM	2022	2	18	7	0.32
SMSM	2023	2	18	8	0.36
TLKM	2020	6	65	29	0.54
TLKM	2021	9	61	43	0.55
TLKM	2022	9	54	31	0.47
TLKM	2023	10	68	17	0.49
UNTR	2020	6	43	4	0.44
UNTR	2021	6	49	6	0.47
UNTR	2022	6	49	4	0.35
UNTR	2023	6	30	6	0.35
VICI	2020	6	12	5	0.45
VICI	2021	6	12	5	0.55
VICI	2022	6	18	5	0.52
VICI	2023	6	17	4	0.64
WINS	2020	3	12	8	0.38
WINS	2021	4	14	8	0.37
WINS	2022	4	12	13	0.54
WINS	2023	3	12	13	0.51
WTON	2020	4	29	4	0.41
WTON	2021	5	21	7	0.41
WTON	2022	5	25	9	0.47
WTON	2023	5	31	4	0.58

Lampiran 2

Indeks GRI 2016

Standart Topik GRI	Sub Topik GRI	Item Pengungkapan	
GRI 102: Pengungkapan Umum	Profil Organisasi	102-1	Nama Organisasi
		102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
		102-3	Lokasi kantor Pusat
		102-4	Lokasi Operasi
		102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum
		102-6	Pasar yang dilayani
		102-7	Skala organisasi
		102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
		102-9	Rantai pasokan
		102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
		102-11	Pendekatan atau prinsip pencegah
		102-12	Inisiatif Eksternal
		102-13	Keanggotaan asosiasi
	Strategi	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
		102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang
	Etika dan Integritas	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
		102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika
	Tata Kelola	102-18	Struktur tata kelola
		102-19	Mendelegasikan wewenang
		102-20	Tanggung jawab singkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
		102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan dan sosial
		102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya
		102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi
		102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi
		102-25	Konflik kepentingan
		102-26	peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi
		102-27	Pengetahuan kolektif badan tatakelola tertinggi
		102-28	Mengevaluasi kinerja badan tatakelola tertinggi
		102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan dan sosial
		102-30	Keefektifan proses manajemen risiko
		102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial

		102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
		102-33	Mengomunikasikan hal hal kritis
		102-34	Sifat dan Jumlah total hal hal kritis
		102-35	Kebijakan remunerasi
		102-36	Proses untuk menentukan remunerasi
		102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi
		102-38	Rasio Kompensasi
		102-39	Presentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan
		Keterlibatan Pemangku Kepentingan	102-40
	102-41		Perjanjian perundingan kolektif
	102-42		Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
	102-43		Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
	102-44		Topik utama dan hal hal yang diajukan
	Praktik Pelaporan	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
		102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik
		102-47	Daftar topik material
		102-48	Penyajian kembali informasi
		102-49	Perubahan dalam pelaporan
		102-50	Periode pelaporan
		102-51	Tanggal laporan terbaru
		102-52	Siklus pelaporan
		102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
		102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI
		102-55	Indeks isi GRI
		102-56	Assurance oleh pihak eksternal
	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya
103-2		Pendekatan manajemen dan komponennya	
103-3		Evaluasi pendekatan manajemen	
GRI 200: Ekonomi	201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
		201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
		201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

	202: Keberadaan Pasar	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum Regional
		202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
	203: Dampak Ekonomi tidak langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
	204: Praktik Pengadaan	204-1	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
	205: Anti-Korupsi	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
		205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
		205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
	206: Perilaku Anti-Persaingan	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik anti-trust dan monopoli
	GRI 300: Lingkungan	301: Material	301-1
301-2			Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3			Produk reclaimed dan material kemasannya
302: Energi		302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
		302-2	Konsumsi energi diluar organisasi
		302-3	Intensitas energi
		302-4	Pengurangan konsumsi energi
		302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
303: Air		303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
		303-2	Sumber air yang secara signifikan di pengaruhi
		303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
304: Keanekaragaman Hayati		304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
		304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
		304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi

		304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
	305: Emisi	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
		305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
		305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
		305-4	Intensitas emisi GRK
		305-5	Pengurangan emisi GRK
		305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
		305-7	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udarasignifikan lainnya
	306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah	306-1	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan
		306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
		306-3	Tumpahan yang signifikan
		306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
		306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
	307: Kepatuhan Lingkungan	307-1	Ketidak patuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
	308: Penilaian Lingkungan Pemasok	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
		308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
	GRI 400: Sosial	401: Kepegawaian	401-1
402-2			Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
402-3			Cuti melahirkan
402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen		402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja		403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen- pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
		403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan

		403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
		403-4	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
	404: Pelatihan dan pendidikan	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
		404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
		404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
	405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
		405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
	406: NonDiskriminasi	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	407: keabsahan Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak-hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
	408: Pekerja Anak	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
	409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
	410: Praktik Keamanan	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	411: Hak-Hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
	412: Penilaian Hak Asasi Manusia	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
		412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

		412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
413: Masyarakat Lokal		413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
		413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
414: Penilaian Sosial Pemasok		414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
		414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
415: Kebijakan Publik		415-1	Kontribusi politik
416: Kesehatan dan Keselamatan pelanggan		416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
		416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
417: Pemasaran dan Pelabelan		417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
		417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
		417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
418: Privasi Pelanggan		418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
419: Kepatuhan Sosial Ekonomi		419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Lampiran 3

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	156	2.00	11.00	5.2821	1.95364
Dewan Direksi	156	12.00	86.00	24.7115	17.02484
Komite Audit	156	2.00	43.00	9.2885	7.62848
Laporan Keberlanjutan	156	0.22	0.85	0.4997	0.12785
Valid N (listwise)	156				

Lampiran 4

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	156	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.12127258
Most Extreme Differences	Absolute	0.053
	Positive	0.053
	Negative	-0.043
Test Statistic	0.053	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 5

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.090	0.018		5.000	0.000
	Dewan Komisaris	-0.002	0.003	-0.042	-0.511	0.610
	Dewan Direksi	0.000	0.000	0.095	1.065	0.288
	Komite Audit	0.001	0.001	0.066	0.758	0.450
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Lampiran 6

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	0.100	0.082	0.12246	1.177
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi					
b. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan					

Lampiran 7

Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	Keterangan		
		Tolerance	VIF	
1	Dewan Komisaris	0.957	1.045	tidak terjadi multikolinieritas
	Dewan Direksi	0.807	1.239	tidak terjadi multikolinieritas
	Komite Audit	0.840	1.190	tidak terjadi multikolinieritas

Lampiran 8

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
					B	Std. Error
1	(Constant)	0.400	0.031		12.945	0.000
	Dewan Komisaris	0.019	0.005	0.286	3.633	0.000
	Dewan Direksi	0.001	0.001	0.088	1.026	0.307
	Komite Audit	-0.002	0.001	-0.096	-1.147	0.253
a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan						

Lampiran 9

Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	0.100	0.082	0.12246	1.177
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi					
b. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan					

Lampiran 10

Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.254	3	0.085	5.643	.001 ^b
	Residual	2.280	152	0.015		
	Total	2.533	155			
a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan						
b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi						

Lampiran 11

Uji Statistik T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.400	0.031		12.945	0.000
	Dewan Komisaris	0.019	0.005	0.286	3.633	0.000
	Dewan Direksi	0.001	0.001	0.088	1.026	0.307
	Komite Audit	-0.002	0.001	-0.096	-1.147	0.253
a. Dependent Variable: Laporan Keberlanjutan						

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Suciyanti Yulia Fajar

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Juli 2002

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Krajan Rt 02 Rw 01, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab.
Demak, Jawa Tengah. 59567

Nomor Hp : 085713025432

Email : suciyantifajar@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN Kangkung 01 Lulus Tahun 2013
2. SMPN 09 Semarang Lulus Tahun 2017
3. SMK N 02 Semarang Lulus Tahun 2020
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024

Demikian daftar riwayat hidup saya, dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 September 2024

Suciyanti Yulia Fajar